

# Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

---

- **Peran Negara Menghadapi Globalisasi**  
Rusdiyanta
- **China-ASEAN: From Interdependence to Political Influence?**  
Afrimadona
- **Bangkitnya Gerakan Sosial di Bolivia**  
Emil Radhiansyah
- **Kerjasama Indonesia -UNDP Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007**  
Nur'aini Latifa
- **Peran NGO Dalam Mediasi Konflik Internal : Studi Kasus Peran Crisis Management Initiative Dalam Mediasi Konflik di Aceh**  
Ronald Roger Rohrohmana
- **Cendekiawan dan Demokrasi**  
Iwan Gunawan



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Budi Luhur

# Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

---

Penanggung jawab:  
Dekan FISIP

Pemimpin Redaksi:  
Rusdiyanta

Dewan Redaksi:  
Bambang Pujiono  
Arin Fithriana  
Emil Radhiansyah  
Doddy Wihardi  
Yusran

Reviewer  
Dato' Dr. Junaidi Abubakar  
(Universiti Kebangsaan Malaysia)  
Dr. Syahrial Syarbaini, MA  
(Universitas Indonusa Esa Unggul)  
Dr. Lili Romli  
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Sekretariat  
Samsinar, S.Kom

Alamat Redaksi:  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Budi Luhur, Jln. Ciledug Raya, Petukangan Utara,  
Jakarta Selatan 12260 , Telp: (021)5853753 Ext 252

## **Pengantar Redaksi**

Pembaca yang budiman,

Beberapa tanggapan telah kami terima, sehubungan dengan beberapa edisi penerbitan jurnal ini sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas saran, kritik dan komentar yang konstruktif demi perbaikan jurnal ini.

Penerbitan pada edisi ini mengalami keterlambatan, mengingat minimnya tulisan yang masuk. oleh karena itu, kami mohon maaf atas keterlambatan tersebut.

Kami telah berusaha mengelaborasi ruang lingkup studi hubungan internasional pada setiap edisinya. Untuk edisi ini, kami menampilkan ragam topik di antaranya tulisan Rusdiyanta tentang Peran Negara Menghadapi Globalisasi, Afrimadona tentang China-ASEAN: *From Interdependence to Political Influence?*, Emil Radhiansyah tentang Bangkitnya Gerakan Sosial Di Bolovia, Nur'ani Latifa tentang Kerjasama Indonesia-UNDP Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007, Ronald Roger Rohrohmana tentang Peran NGO Dalam Mediasi Konflik Internal: Strudi Kasus Peran *Crisis Management Initiative* Dalam Mediasi Konflik di Aceh, Iwan Gunawan tentang Cendikiawan dan Demokrasi.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi bagi para pembaca. Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Desember 2010

Salam kami,

Dewan Redaksi

## DAFTAR ISI

<i>Rusdiyanta</i>	Peran Negara Menghadapi Globalisasi	1-12
<i>Afrimadona</i>	<i>China-ASEAN: From Interdependence to Political Influence?</i>	13-24
<i>Emil Radhiansyah</i>	Bangkitnya Gerakan Sosial Di Bolivia	25-39
<i>Nur'aini Latifa</i>	Kerjasama Indonesia-UNDP Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007	40-52
<i>Ronald Roger Rohrohmana</i>	Peran NGO Dalam Mediasi Konflik Internal: Strudi Kasus Peran Crisis Management Initiative Dalam Mediasi Konflik di Aceh	53-65
<i>Iwan Gunawan</i>	Cendikiawan dan Demokrasi	66-75

## Peran Negara Menghadapi Globalisasi

Rusdiyanta, S.IP, M.Si<sup>1</sup>

### Abstract

*In this era of globalization, international relations run increasingly complex and interdependent both the actor and the issues. Economic relations, social and culture also increased territorial boundaries. Globalization which is based on liberalism has encouraged the strengthening of the role of transnational actors in all areas of life and erodes the role of state. The increasing role of the WTO, OECD, IMF, World Bank, MNCs, and INGOs indicated the phenomenon. However, states still have an important role and needed to protect the people interest and make regulations for the liberalization can be mutually beneficial.*

*Keyword: globalization, liberalization, the role of state.*

### Latar Belakang

Dalam era globalisasi, di mana batas-batas teritorial sudah mulai kabur sehingga seolah-olah sudah terjadi penyatuan sistem global yang meliputi ekonomi, politik, kebudayaan dan lain-lain. Kondisi seperti ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang sangat terbuka bagi semua orang. Menurut Wallerstein, globalisasi sebagai proses pembentukan sistem kapitalis dunia. Kapitalisme semakin kuat, dan peran masyarakat di dalam sistem kapitalisme semakin besar sebagai konsekuensi dari pembagian kerja sistemik yang mendunia. Hubungan-hubungan politik dan militer memancar dari hubungan ekonomi yang bersifat mendasar, sedang kebudayaan dan agama berada dalam posisi pinggiran. (*epi-phenomenal*)<sup>2</sup>

Dalam kerangka ekonomi, globalisasi ditandai liberalisasi perdagangan yang tidak lagi mengenal batas geografi. Dalam perspektif liberalisme, aktor non-negara merupakan aktor utama dan primer dalam ekonomi. Peran Negara bersifat skunder, sekedar sebagai penjamin berlangsungnya pasar bebas. Kondisi ini mendorong meningkatnya perusahaan multinasional serta rezim-rezim internasional seperti World Trade Organization, International Monetary Fund dan World Bank. Benarkah globalisasi yang mengusung paham liberal menyebabkan menurunnya peran negara terutama dalam bidang ekonomi?

---

<sup>1</sup> Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Budi Luhur

<sup>2</sup> Roland Robertson, *Globalization Social Theory and Global Culture*. (, London: Sage, 1992), hlm.14-15

## Apakah Globalisasi?

Globalisasi adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, social dan budaya yang melewati batas-batas internasional.<sup>3</sup> Hal ini terkait dengan konsep interdependensi yang berarti ketergantungan timbal balik: rakyat dan pemerintah dipengaruhi oleh apa yang terjadi di manapun, oleh tindakan rekan lainnya di negara lain.<sup>4</sup> Dengan demikian, terjadi interaksi timbal balik dan integrasi antar actor-aktor yang melintasi batas-batas negara.

Globalisasi merupakan suatu proses meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi sebuah negara. Melalui proses ini, dunia tidak lagi ada batas-batas sehingga memungkinkan interaksi diantara manusia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat. Globalisasi juga dapat dipahami sebagai proses lahirnya suatu masyarakat global, suatu dunia yang terintegrasi secara fisik melampaui batas-batas negara, blok-blok ideologis dan lembaga-lembaga ekonomi politik.<sup>5</sup> Secara preskripsi, globalisasi dapat dimaknai bahwa globalisasi meliputi liberalisasi pasar global dan pasar internasional dengan asumsi bahwa arus perdagangan bebas, modal dan informasi akan menciptakan hasil yang terbaik bagi pertumbuhan dan kemakmuran manusia.<sup>6</sup>

Dalam bidang politik, ada indicator munculnya kecenderungan supranasionalisme yakni penggabungan beberapa negara-bangsa ke dalam satu pemerintahan atau governance tunggal, semisal penggabungan beberapa Negara ke dalam lembaga internasional WTO (World Trade Organization) atau lahirnya Uni Eropa. Keterlibatan politik suatu organisasi regional atau Negara dalam wilayah lain, seperti keterlibatan AS dalam berbagai konflik, tersebarnya pasukan perdamaian PBB dalam berbagai konflik di dunia, meluasnya terorisme internasional dan sebagainya.

Dalam bidang budaya, ditandai pertukaran yang luar biasa dalam pemberitaan, gagasan-gagasan, fashion, perkembangan global merek-merek dagang semacam Coca Cola atau Mc Donalds, film-film Hollywood dan musik-musik AS yang menguasai pasar dunia, globalisasi agama, dan demam piala dunia sepak bola yang ditonton hamper mayoritas penduduk dunia.

---

<sup>3</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.266

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.147

<sup>5</sup> John Baylis and Steve Smith, *Globalization of world Politics, An Introduction to international relation* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm.8

<sup>6</sup> James Petras and Henry Veltmeyer. 2002. *Imperialisme Abad 21*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2003, hlm.8

Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi dan informasi mendorong pesatnya interaksi ekonomi antar negara melalui perdagangan, arus financial dan migrasi penduduk maupun perusahaan yang melahirkan integrasi ekonomi dunia. Globalisasi ekonomi ini bercirikan adanya unsure terpenting yakni proses globalisasi capital.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah munculnya masyarakat global yang menyatu dalam bidang ekonomi, politik, lingkungan dan kebudayaan yang mana dapat masyarakat di belahan dunia yang lain. Akibat perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi maka pertumbuhan ekonomi, politik, teknologi dan kebudayaan sangatlah cepat dengan aktor-aktor individu, komunitas, pengusaha, dan pemerintah di seluruh dunia yang saling terhubung.

Menurut Baylis dan Smith (2006), globalisasi dapat dijelaskan melalui aspek-aspek inheren yang menjelaskan globalisasi sebagai proses global yakni:<sup>7</sup>

1. Komunikasi; globalisasi merupakan proses yang ditandai maraknya pertumbuhan jaringan computer, media elektronik dan sejenisnya yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas batas dan limit waktu yang menakjubkan.
2. Organisasi; globalisasi merupakan wujud perluasan organisasi dalam berbagai bidang dan lintas batas geografis dalam satu kepentingan yang sama. Perusahaan Multinasional, World Intellectual Property Organization merupakan representasi organisasi dengan aktivitas multilateral.
3. Ekologi; isu global lingkungan menjadi tema bersama bagi seluruh bangsa di dunia sebagai persoalan yang membutuhkan jalan keluar bersama. Seperti masalah menipisnya lapisan ozon bumi, global warming, kerusakan hutan.
4. Produksi; biasa dikenal produksi global atau pabrik global yang menciptakan hasil usaha melalui proses bertahap dan melibatkan banyak Negara dalam untuk penyelesaian proses hasil produksinya. Seperti produksi sepeda motor, mobil, microelektronik.
5. Militer; tiada batas wilayah yang tidak dapat ditembus oleh kemampuan militer sebuah Negara atau organisasi internasional.
6. Everyday thinking; masyarakat dunia baru menyadari apabila dunia ini benar-benar wilayah tunggal yang didiami secara bersama sejak diterbitkannya foto dunia yang diambil dari luar angkasa.

---

<sup>7</sup> Baylis and Smith, *The Globalization*...., hlm.10-13

## Pendorong dan Katalisator

Pada abad XXI, dunia mengalami berbagai transformasi dalam segala aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan sebagainya. Proses transformasi tersebut selaras dengan kekuatan yang mendorong globalisasi, antara lain: (1) globalisasi dari proses industrialisasi, (2) globalisasi keuangan, komunikasi dan informasi, (3) globalisasi kekayaan, pekerjaan dan migrasi, (4) globalisasi efek polusi biosfir terhadap kehidupan manusia, (5) globalisasi dari perdagangan persenjataan, dan (6) globalisasi kebudayaan, konsumsi, dan media massa.<sup>8</sup>

Menurut kalangan Strukturalis-Marxis, globalisasi dipicu oleh kapitalisme, sehingga globalisasi sering disebut hiperkapitalisme<sup>9</sup> Jika kapitalisme dipahami sebagai struktur produksi yang didominasi oleh proses akumulasi surplus, maka sangat logis. Surplus ini diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja yang murah, atau penggunaan teknologi produksi. Dalam konteks ini, analisis imperialisme Lenin dapat digunakan menjelaskan bagaimana kapitalisme dapat mendorong globalisasi.

Perkembangan ini mendorong terciptanya penumpukan capital, sementara keuntungan yang diperoleh dari produksi dan pasar dalam negeri semakin menurun. Mereka mencari pasar-pasar baru dan wilayah-wilayah baru untuk menjamin kelangsungan akumulasi surplus. Dengan kata lain, mereka harus mencari sumber-sumber bahan baku untuk industri dan pasar-pasar baru bagi barang-barang produksinya sehingga proses produksi terus berlangsung dan akumulasi keuntungan terjamin. Selanjutnya, wilayah-wilayah baru ini menjadi wilayah jajahan ekonomi dengan menjadikannya sebagai tempat menanamkan investasi baru.

Ada dua factor utama yang dapat menjadi katalisator (pemercepat) perkembangan globalisasi, yakni revolusi di bidang teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi. Dua hal ini mampu mengubah secara fundamental struktur ekonomi politik internasional, seperti dikatakan Anthony Gidden bahwa jika globalisasi yang ditopang oleh revolusi teknologi komunikasi tersebut tidak hanya baru, tetapi juga revolusioner.<sup>10</sup> Revolusi teknologi komunikasi memungkinkan terciptanya aliran modal global sangat besar dan cepat. Aliran modal ini, selain mendorong ekonomi-ekonomi dunia di beberapa negara-bangsa, sekaligus menghancurkan ekonomi nasional negara-bangsa yang mempunyai fondasi rapuh dan tidak efisien. Revolusi teknologi komunikasi juga

---

<sup>8</sup> Tilaar, Tilaar, H.A.R., *Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Era Globalisasi*. (Jakarta. Gramedia, Widiasara Indonesia, 1997)

<sup>9</sup> Jan Aart Scholte., *Globalization: A Critical Introduction*. (New York: St. Martin Press, 2000), hlm.212

<sup>10</sup> Gidden, Gidden, Anthony. 2000. *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. (Jakarta: Gramedia 2000), hlm.3



mendorong *global society* yang terikat oleh adanya media informasi yang beroperasi dalam skala global. Sedangkan murahannya biaya transportasi mendorong aliran barang-barang industri dan tenaga kerja melintasi batas-batas Negara.

Kedua katalis tersebut mampu mengubah cara bagaimana proses akumulasi terjadi. Perubahan-perubahan ini berkaitan dengan luas komodifikasi, pada satu sisi, dan konteks organisasional pada sisi lain<sup>11</sup> Dalam hal komodifikasi, globalisasi telah memacu pertumbuhan *consumer capital*, *finance capital*, dan *communication and information capital*. Menurut Scholte, globalisasi yang berlansung sejak 1960-an telah membantu memperluas jangkauan komodifikasi dalam tiga wilayah. *Pertama*, konsumerisme yang terhubungkan dengan produk-produk global yang diperluas oleh *capital industrial*. *Kedua*, pertumbuhan lembaga-lembaga yang beroperasi dalam lingkup global seperti global banking dan global securities sehingga memperluas jangkauan modal uang. Lembaga-lembaga global ini menjadi fasilitator untuk mengembangkan berbagai jenis produksi dan juga sarana akumulasi itu sendiri. *Ketiga*, globalisasi mendorong perluasan komodifikasi ke dalam wilayah baru yang melibatkan informasi dan komunikasi.

Dalam konteks organisasi, globalisasi telah menghasilkan akumulasi yang terus tumbuh melalui pusat-pusat ekonomi seberang laut, dan perusahaan-perusahaan lintas batas territorial Negara bangsa. Akibatnya mendorong terjadinya gelombang akuisisi dan merger perusahaan-perusahaan nasional dan transnasional sehingga mendorong terjadinya konsentrasi modal.

Globalisasi merupakan bentuk baru hegemoni ekonomi, legitimasi terhadap pasar, kompetisi, dan profit. Pasca dekolonisasi dan runtuhnya blok sosialis, globalisasi menjadi bentuk baru hegemoni atas nama pasar, revolusi informasi, *global village*, dan sebagainya.

Sementara itu, lembaga-lembaga global (IMF, WTO, Bank Dunia) semakin mempunyai peran penting terhadap para pengambil kebijakan di negara-negara ketiga. WTO mempunyai peran yang signifikan bahkan paling berkuasa sebagai rezim ekonomi internasional dalam menjamin terselenggaranya liberalisasi ekonomi. IMF menyediakan utang bagi Negara-negara debitur dengan persyaratan ketat yang memungkinkan restrukturisasi ekonomi. Sementara Structural Adjustment bank Dunia menggunakan panduan serupa dan mendorong kecenderungan yang sama dalam mensubordinasikan kebijakan domestic, terutama kebijakan yang berkaitan dengan proteksi dan subsidi. Keduanya lazim disebut *Washington Consensus*, yang menekankan liberalisasi pasar, privatisasi BUMN, dan

---

<sup>11</sup> Scholte, 2000, hlm.146

kebijakan lain yang dirancang untuk mendorong investasi asing, termasuk dalam hal ini devaluasi dan deregulasi.<sup>12</sup>

Para pemikir neo-liberalisme yang berada dalam lembaga-lembaga global seperti WTO, IMF dan Bank Dunia, mempunyai agenda penting untuk meliberalisasikan system ekonomi dan politik negara-negara di dunia. Hal ini dilakukan untuk menjamin dilaksanakannya kebijakan perdagangan bebas yang diyakini merupakan instrument yang paling efektif untuk meraih kemakmuran dan perdamaian dunia. Seperti dikatakan David Korten, bahwa para pendukung globalisasi ekonomi, dalam berbagai bentuknya, mempunyai keyakinan bahwa globalisasi ekonomi dan pasar bebas akan mendorong demokrasi dalam skala luas. Oleh karena itu, pembicaraan politik tentang pasar dan

Lembaga-lembaga multilateral yang dibentuk seperti *World Bank dan International Monetary Fund (IMF)* yang bertujuan membantu pembangunan negara-negara sedang berkembang belum memberi hasil yang memuaskan. Perundingan-perundingan dalam kerangka GATT dan kemudian menjelma menjadi *World Trade Organization (WTO)* juga menciptakan masalah tersendiri bagi negara-negara sedang berkembang. Pasar bebas yang dicanangkan sudah hampir dapat dipastikan ada negara-negara yang diuntungkan dan dirugikan. Dan mengingat tingkat kesiapan dan kemajuan yang berbeda, maka negara-negara yang lebih dahulu mampu membangun daya saingnya yang akan memetik keuntungan lebih besar. Melalui GATT dan Putaran Uruguay, dimana negara-negara sedang berkembang dipaksa untuk membuka pasar dalam negerinya untuk "menyehatkan" sistem perekonomian negara industri maju. Martin Khor Kok Peng menyebut hubungan NIM dengan NSB sebagai *neo-imperialisme* atau imperialisme gaya baru karena yang diperoleh negara Selatan atau NSB bukan kemakmuran tetapi kemiskinan.<sup>13</sup>

### **Bagaimana Peran Negara?**

Kapitalisme global pasca PD II bertumpu pada prinsip embedded liberalism yang menekankan arti penting partisipasi negara dalam perekonomian domestik sembari menolak keterlibatan yang serupa pada level internasional (Cox, 1997; Hoogevelt, 2001). Prinsip ini sebagai jawaban atas malaise ekonomi yang bersumber dari norma-norma merkantilisme yang melandasi praktek perdagangan antar negara sepanjang abad sebelumnya yang menganjurkan intervensi negara dalam

<sup>12</sup> Tabb, Tabb, William K. 2002. *Tabir Politik Globalisasi*. Yogyakarta: Lafadl 2002, hlm.76

<sup>13</sup> Martin Khor Kok Peng, *Hubungan Utara-Selatan, Kerjasama atau Konflik?* (Jakarta: YOI, 1993)

pasar internasional sebagai jalan terbaik untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>14</sup>

Motivasi utama *embedded liberalism* adalah mengembalikan elan perdagangan bebas, menggantikan sikap-sikap protektif dan perang tarif yang mewarnai perekonomian dunia sebelum dan selama perang. Tegaknya *Embedded Liberalism* didukung atas pondasi model akumulasi yang disebut *fordism-taylorism* yang memperkenalkan otomatisasi, *assembly line* dan standarisasi dalam sistem produksi (Hoogevelt, 2001; Harvey, 1989). Model ini diperkenalkan oleh Henry Ford dalam memproduksi kendaraan bermotor, dengan cara memecah-mecah proses pembuatan setiap bagian kendaraan sambil mengkoordinasi sub-sub kerja yang terpisah tersebut dalam standarisasi bersama. Standarisasi produksi ini benar-benar menjadi model akumulasi yang menjanjikan setelah Frederick Charles Taylor berhasil menggagas sistem pembagian kerja berdasarkan *assembly line*. Dalam sistem ini, setiap pekerja di diberi tanggung jawab dan keterampilan kerja yang sangat spesifik pada setiap tingkatan proses pembuatan satu bagian produksi.

Kaum hiperglobalis beryakinan sangat kuat terhadap kedaulatan pasar dan marginalisasi peran negara.<sup>15</sup> Ciri utama pandangan mereka adalah sikap *optimistic* mereka dalam melihat globalisasi pengangguran yang berlebihan terhadap pasar. Sementara dalam waktu yang bersamaan 'menghujat' habis-habisan peran negara. Dalam pandangan kelompok ini, globalisasi didefinisikan sebagai sejarah baru kehidupan manusia dimana "Negara tradisional telah menjadi tidak relevan lagi, lebih-lebih menjadi tidak mungkin dalam dalam unit-unit bisnis dalam sebuah ekonomi global". Globalisasi ekonomi membawa serta gejala "denasionalisasi" ekonomi melalui pendirian jaringan-jaringan produksi transnasional, perdagangan dan keuangan. Dalam lingkungan ekonomi tanpa batas ini, pemerintahan nasional tidak lebih sekedar *transmission belt* bagi kapitalis global, atau secara lebih singkat sebagai institusi perantara yang menyisip diantara pemerintahan lokal dan regional yang sedang tumbuh, serta mekanisme pengaturan global.<sup>16</sup>

Dalam kaitannya dengan globalisasi, Kenichi Ohmae (2002:3) mengatakan bahwa dalam pasar dunia yang semakin kompetitif sekarang ini, *nation-state* tidak lagi mempunyai sumber-sumber yang tanpa batas yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk mendukung mewujudkan

---

<sup>14</sup> Robert Gilpin, *The Political Economic of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987)

<sup>15</sup> David. Held, At.al. *Global Transformation: Politics, Economics and Culture*. (Stanford: Stanford University Press, 1999.)

<sup>16</sup> Budi Winarno, "Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi", dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.II No.1, Mei 2004

ambisi mereka. Sehubungan dengan aliran riil aktivitas ekonomi, Negara-negara bangsa telah kehilangan perannya sebagai unit-unit partisipasi yang bermakna dalam ekonomi dunia yang tanpa batas.<sup>17</sup> Dalam dunia baru yaitu dunia tanpa batas (*the borderless world*), Ohmae mengatakan bahwa Negara-negara bangsa dan penguasaan terhadap militer tidak lagi memainkan peran penting. Bahkan semakin memudar, dan secara meyakinkan digantikan oleh peran penting lain nonteritorial yang semakin meningkat seperti perusahaan multinasional, gerakan-gerakan transnasional, dan organisasi-organisasi internasional.<sup>18</sup> (Keohane & Nye, 1977:3). Namun menurunnya peran Negara bangsa justru akan menjadi pembuka ke arah ekonomi global yang sesungguhnya, yang bercirikan ketiadaan hambatan dalam perdagangan, aliran uang secara global, dan kegiatan internasional dari perusahaan multinasional.<sup>19</sup>

Kekuatan (militer) dan penguasaan wilayah kurang menguntungkan negara dan perdagangan yang lebih menguntungkan karena adanya perubahan karakter dan dasar dari produksi ekonomi yang terkait pada modernisasi. Masa lalu penguasaan wilayah dan sumber alam yang banyak merupakan kunci kejayaan, namun dalam dunia sekarang kekuatan tenaga kerja yang berkualitas, akses informasi, dan modal keuangan yang menjadi kunci keberhasilan. Negara-negara yang berhasil secara ekonomi adalah "Negara dagang" seperti Jepang dan Jerman.<sup>20</sup>

Ada empat alasan yang dikemukakan Ohmae, tentang semakin menurunnya peran Negara. *Pertama*, unit-unit yang telah lama mapan dan terdefinisi secara politis ini semakin kurang memberikan kontribusi dan semakin kurangnya kebebasan untuk memberi berbagai kontribusi. Pasar semakin berdaulat, dan biasa menghukum Negara-negara yang tidak dapat bekerja efisien. Unit-unit Negara sudah semakin kecil dibandingkan dengan aktor-aktor ekonomi internasional. Kerja pasar telah mengecilkan kemampuan Negara untuk mengontrol nilai tukar atau melindungi mata uang mereka. Sehingga *nation-states* sangat rentan dengan disiplin yang dipaksakan oleh pilihan-pilihan ekonomi yang dibuat di tempat lain dan lembaga-lembaga global.

*Kedua*, dalam ekonomi global yang terintegrasi, *nation-states* telah menjadi fiksi *nostalgic*. Kita tidak mungkin lagi berbicara ekonomi Rusia, Cina, Hongkong atau Jepang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Pasar global telah menciptakan mereka ke dalam entitas yang saling terkait,

<sup>17</sup> Kenichie Ohmae, *Hancurnya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*. (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm.16-17

<sup>18</sup> Keohane and Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little Brown, 1977), hlm.3

<sup>19</sup> Robert Gilpin, *The Political Economic...* hlm.8

<sup>20</sup> Richard Rosecrane, *Kebangkitan Negara Dagan, Perdagangan dan Penaklukan di Dunia Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.196

sehingga pembicaraan ekonomi nasional harus serta merta mengkaitkannya dengan ekonomi lainnya. Menurut Ankie Hoogvelt (2001:131), globalisasi ekonomi mengandung tiga prinsip utama; (1) fenomena dunia yang sekarang ini milik bersama hamper setiap orang di muka bumi melahirkan sebuah disiplin pasar global dari sekedar wilayah pasar global; (2) globalisasi menata kembali cara aktivitas ekonomi dikonseptualisasikan dan diorganisasikan yang menghasilkan sebuah pembagian kerja global yang baru; (3) *financiarization* yakni proses yang menjadikan uang sebagai *a real-time resource* yang memungkinkan tingkat mobilitas yang secara kualitatif tidak pernah ada preseden historisnya.

*Ketiga*, akibat mengglobalnya perusahaan-perusahaan transnasional dengan rangkaian produksinya yang semakin mengglobal. Menurut Ohmae, sulit untuk mengenali suatu barang yang diproduksi dan diperdagangkan dengan merujuk pada identitas nasional yang akurat. System produksi yang terintegrasi memungkinkan masing-masing Negara-bangsa menyumbang komponen untuk produksi suatu barang.

*Keempat*, ketika aktivitas ekonomi secara agresif mengadakan label nasional pada saat ini, label itu biasanya dipresentasikan bukan demi akurasi atau di luar concern terhadap kesejahteraan konsumen individual. Dengan kata lain, akibat mengglobalnya ekonomi dunia, konsumen-konsumen dunia yang berdiam dalam suatu batas territorial Negara berpeluang menikmati barang-barang berkualitas tinggi dengan harga murah, dan seringkali diproduksi oleh industri nasional mereka.

Merosotnya kedaulatan dan otonomisasi suatu negara-bangsa diakibatkan setidaknya oleh tiga hal yakni (Budi Winarno, 2004) : *pertama*, lembaga-lembaga pengaturan global yang semakin dominan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi politik. Dalam bidang perdagangan ada lembaga GATT/WTO, sementara dalam bidang keuangan ada lembaga IMF dan Bank Dunia. *Kedua*, adanya konvensi-konvensi internasional, suatu negara-bangsa tidak lagi bisa bersembunyi di balik kedaulatan dan urusan dalam negeri. Dalam tataran tertentu, konvensi-konvensi ini telah jauh mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Seperti masalah pengembangan nuklir dan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap konvensi-konvensi ini berakibat dikucilkan dari komunitas internasional atau embargo ekonomi serta pemboikotan produk-produk ekspor yang mereka hasilkan. *Ketiga*, lembaga-lembaga kerja sama regional seperti ASEAN, NAFTA dan Uni Eropa sedemikian kuat mempunyai kekuasaan dalam bidang ekonomi.

## Peran Siapa Meningkatkan?

Memudarnya peran negara dalam ekonomi dan politik, menyebabkan politisi dan pemerintahan kehilangan banyak kekuasaan. Kekuatan-kekuatan yang bersifat impersonal dalam pasar dunia seperti perusahaan swasta dalam bidang keuangan, industri dan perdagangan telah bekerja sama satu sama lain dalam bidang ekonomi daripada melalui kerjasama pemerintahan, dan sekarang perusahaan-perusahaan ini lebih berkuasa dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan nasional.

Setidaknya ada tiga aktor utama yang kini tengah menggeser kemampuan, kekuasaan, dan kedaulatan Negara-bangsa. Menurut Scholte, ketiga aktor non-teritorial atau *prastate* ini adalah lembaga-lembaga pengaturan global (*trans world government*), perusahaan multinasional atau transnasional (*multinational or transnational corporation*) dan lembaga swadaya masyarakat.

*Pertama*, lembaga-lembaga pengaturan global seperti WTO, OECD, IMF dan World Bank mempunyai kekuasaan mengatur hubungan-hubungan ekonomi dan politik global yang harus ditaati oleh Negara-negara anggota. Dengan dukungan Negara-negara maju seperti AS, Jepang dan Negara-negara Uni Uni Eropa, lembaga-lembaga ini paling bertanggung jawab dalam mendorong globalisasi ekonomi dan telah dianut lebih dari separuh Negara di dunia. Bahkan mempunyai kekuasaan untuk memberi sanksi kepada negara-negara anggota yang melanggar. Dalam bidang teknologi dan pengembangan senjata, ada IAEA yang mampu membatasi pengembangan nuklir.

*Aktor transnasional kedua* adalah perusahaan multinasional atau transnasional. Meskipun ada perbedaan diantara keduanya, namun ciri yang paling utama keduanya adalah perusahaan-perusahaan ini beroperasi melintasi batas-batas teritorial negara-bangsa. Lebih-lebih perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi telah membuat perusahaan-perusahaan ini menjadi semakin mengglobal dengan kecepatan dan besaran yang mengesankan. Diperkirakan 3.700 perusahaan multinasional dan transnasional tersebar di seluruh dunia. Beberapa perusahaan tersebut mempunyai pendapatan tahunan melampaui produk nasional kotor beberapa negara. Misalnya pada tahun 1999 General Motor melampaui produk nasional kotor Denmark, dan Wal-Mart melampaui Polandia. Ada perusahaan multinasional juga mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara, bahkan mempengaruhi penggantian kepemimpinan nasional seperti dilakukan ITT di Chili.

*Aktor ketiga* adalah badan-badan swasta atau sering dikenal dengan *Non-Governmental Organization (NGO)*,<sup>21</sup> Setidaknya ada 50.000 NGO di Dunia Ketiga, dan jika digabung dengan negara maju akan jauh lebih besar. Peranan NGO ini semakin penting mengingat mereka memperoleh dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional, agen-agen pemerintah Eropa, Amerika dan Jepang serta pemerintahan nasional mereka. Perkembangan teknologi komunikasi juga memungkinkan mereka membuat jaringan kerja internasional, membahas isu-isu yang sama untuk kemudian membuat agenda gerakan yang sama pula.

## Simpulan

Globalisasi menimbulkan dampak tergesernya kekuasaan dan otonomi negara kepada aktor lain, tetapi tidak sama sekali hilang. Negara tetap mempunyai peran penting dalam globalisasi. Terutama dalam pengaturan-pengaturan untuk menjamin terjadinya pasar bebas. Negara juga penting sebagai benteng permainan para kapitalis dunia yang hanya mengejar keuntungan ekonomi. Sementara negara harus melindungi rakyat atau warga negaranya dari dampak negatif globalisasi.

## Daftar Pustaka

- Baylis, John and Steve Smith. 2006. *Globalization of world Politics, An Introduction to international relation*. Oxford University Press, Oxford.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ohmae, Kenichie. 2002. *Hancurnya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*. Qalam, Yogyakarta
- Gidden, Anthony. 2000. *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Gramedia, Jakarta
- Gilpin, Robert.1987. *The Political Economy of International Relations*.
- Scholte, Jan Aart. 2000. *Globalization: A Critical Introduction*. St. Martin Press, New York.
- Hanafi, Hasan. 2003. *Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam untuk Globalisme, Pluralisme dan Egalitarianisme Antarperadaban*. IRCiSoD, Yogyakarta.

---

<sup>21</sup> Petras and Veltmeyer, *Imperialisme...*Bab.VI

- Held, David. At.al. 1999. *Global Transformation: Politics, Economics and Culture*. Stanford University Press, Stanford.
- Keohane and Joseph Nye. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little Brown, Boston
- Korten, David. 2002. *Kehidupan Setelah Kapitalisme*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Petras, James and Henry Veltmeyer. 2002. *Imperialisme Abad 21*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Peng, Martin Khor Kok. 1993. *Hubungan Utara-Selatan, Kerjasama atau Konflik?* YOI, Jakarta.
- Rosecrane, Richard. 1991. *Kebangkitan Negara Dagang, Perdagangan dan Penaklukan di Dunia Modern*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Robertson, Roland. 1992. *Globalization Social Theory and Global Culture*. Sage, London
- Robinson, William I. (ed.). *Hantu Neo-liberalisme*. C-Books. Jakarta
- Sorensen, George. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Dunia yang Sedang Berubah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tabb, William K. 2002. *Tabir Politik Globalisasi*. Lafadl, Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R, 1997. *Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Gramedia, Widiasara Indonesia, Jakarta.
- Winarno, Budi, "Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi", dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.II No.1, Mei 2004



## **China-ASEAN: From Interdependence to Political Influence?**

**Afrimadona, SIP, MA\***

### **Abstrak**

*Paper ini mencoba mendiskusikan bagaimana Cina menggunakan kekuatan ekonomi-nya untuk mencapai kepentingannya di Asia Tenggara. Dengan berpijak pada konstruk teoretik interdependence sebagai kerangka analisis, paper ini berargumen bahwa dalam tingkat tertentu, kemampuan Cina untuk mengubah economic power-nya menjadi political influence terbatas. Hal ini dikarenakan dalam hubungan yang saling interdependen, kekuatan ekonomi dan political influence terkait secara dinamis (tidak statis) sehingga economic power (variable independent) tidak secara otomatis dapat menciptakan political influence (variable dependent). Dalam kondisi interdependen, power menjadi lebih situation-specific dimana bargaining situation dan marginal utility dari nilai-nilai yang diperebutkan memainkan peran signifikan dalam menentukan outcome (dalam bentuk perubahan perilaku negara yang selaras dengan kepentingan Cina.*

*Kata kunci: ASEAN, Cina, Kekuatan Ekonomi, Interdependensi, pengaruh politik.*

### **Introduction**

This essay discusses how China's economic power can be used to advance its political interests in Southeast Asia. Specifically, it will assess China-ASEAN relations in some economic issues (especially the case of ASEAN-China Free Trade Area) and relate them to the political outcomes China gained from this relation. This topic is important because recently the rise of China as an Asian economic giant has raised much speculation over the future of the regional order in Asia. Most of them speculate whether this economic giant can some days later be a hegemonic power that can dictate the new rules of the game for the region in favour of its interests. Whatever their arguments about this are, to be sure, this debate will create serious policy implications on the part of regional actors. To understand the problem well, first of all we need to be sure whether or not China's economic power can be really transformed into political influence. We need to know under what conditions this economic power can be powerful as a policy tool and whether China has attempted to create these conditions. We also need to know what challenges it may face in pursuing this policy. Our understanding of these problems will enable us to better grasp the debate and predict what would happen under current conditions.

---

\* Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

So far, there are at least two competing arguments on the likely future of Asia in relation to China. Some argue that the increasing prosperous and wealthy China will most likely to be a new regional hegemony that can shape the new rules of the game in the region in parallel with its interests.<sup>1</sup> Historical facts show that the economic power correlates positively with political power. States with strong economic power frequently play major role in international political stage. The history of the US rise to global political scene is the example of how economic power can be political power.<sup>2</sup>

On the other hand, there are also many scholars who are doubtful of China's ability to dominate Asia.<sup>3</sup> To them, China's economic power is still limited and far below that of the US and its allies such as Japan and the European Union. Some data support this view.<sup>4</sup> The prospect for China's hegemonic position in the region is increasingly complicated by the more convoluted and unpredictable configurations of power in the region like position of Japan and active participation of Australia and India in it. In brief, these scholars think that there are so many obstacles getting in China's way to achieving its ambitions to be hegemonic in Asia.

Whether or not economic power can be powerful in achieving some political goals actually depends on the nature of relationships between China and ASEAN. Theoretically, political influence can be effective under interdependent relations. Therefore, in this paper, the concept of economic interdependence will be deployed. This concept will guide me to examine the relationships between economic power, operationalised into economic resources like market size, economic growth and capital; and the attainment of China's political interest in the region like elimination of 'China threat' image, the acceptance of the 'One-China Policy' and the

---

<sup>1</sup> The potential challenge by rising China is suggested by several authors; see for example Deny Roy, "Hegemon on the Horizon? China's Threat to East Asian Security", *International Security*, 19:1 (Summer 1994), pp. 149-168; and Amitav Acharya, "Seeking Security In the Dragon's Shadow: China and Southeast Asia in the Emerging Asian Order", *Working Paper*, No. 44 (Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 2003).

<sup>2</sup> See Fareed Zakaria, *From Wealth to Power: the Unusual Origin of America's World Role* (New Jersey: Princeton University Press, 1998)

<sup>3</sup> See, for example, Sheng Lijun, "China in Southeast Asia: the Limits of Power", *Japan Focus*, August 4, 2006. see <http://japanfocus.org/products/toppdf/2184>

<sup>4</sup> Measured in 2006 current dollar price GDP, the US' GDP is US\$ 13, 194.700 billion, Japan's is US\$ 4,366.459 billion, EU (Euro area) is US\$ 10, 588.750 billion and China's is US\$ 2, 644.642 billion.<sup>4</sup> This measure is even more formidable when the US, Japan and EU are united. Their economic size will amount to US\$ 28, 149.909 billion. This is indeed a static measure only, in that it only measures the comparison of their GDP as an indicator of their economic size excluding the flow of money (either in investment or trade flow). See <http://www.imf.org/external/data.htm#data> If economic power is measured dynamically that is, in terms of economic interaction between these economies with Asian states, the numbers for the US and its allies still dwarf those for China. For informative analysis about these calculations, see Sheng Lijun, "China in Southeast Asia: the Limit of Power"

maintenance of stable and conducive regional environment for its economic development.<sup>5</sup> My examination of these variables based on this concept leads me to argue that growing economic interdependence between China and ASEAN *to some extent* can increase China's capacity to use its economic power to advance its political and strategic interests in ASEAN.

Before addressing the argument further, I will proceed to the debate about interdependence and economic power and how it can fit in the analysis on China-ASEAN relations.

### **Economic Power and Interdependence**

Debate on whether or not interdependence matters in power relations was rife in the field of international relations during the 1970s and 1980s. In general, there are two perspectives on the significant effects of this phenomenon on world politics. On the one hand, those scholars clustered under 'neoliberal institutionalism' argue that interdependence does matter in shaping state's cooperative behaviour because it complicates states calculation of relative gains as a result of increasingly complex incentive structure. Interdependence, according to these scholars eventually leads state to think more about absolute rather than relative gains.<sup>6</sup> On the other hand, realist scholars are a bit pessimistic in viewing the effect of interdependence on states' behaviour and world politics. As Waltz argues, interdependence is no more than 'rhetoric' used by the US to disguise the inequality of power showing as if all states are mutually dependent and have interlinked interests.<sup>7</sup> To him, interdependence only exists when there is a division of labour or a specialisation of functions. However, because units perform similar functions, they could not offer what others want, thus interdependence is low among them.<sup>8</sup>

Nevertheless, most observers agree that interdependence can lead to either mutual vulnerability or mutual sensitivity. 'Mutual vulnerability' exists if the breakdown of relationships is too costly for the parties

---

<sup>5</sup> There are many scholars who identify these interests. I cite them from Cheng-Chwee Kuik, "Multilateralism in China's ASEAN policy", *SAIS Working Paper Series WP/05/03* (Washington: Paul Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University, 2003), p. 2.

<sup>6</sup> See Keohane, "Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics", in *International Institutions and State Power* (Boulder: Westview Press, 1989), pp. 1-20.

<sup>7</sup> See, Kenneth Waltz, "The Myth of National Interdependence", in *Globalism Versus Realism: International Relations' Third Debate* (Boulder: Westview Press, 1982), p. 91

<sup>8</sup> *Ibid*, pp. 82-83. His analysis on the phenomenon of interdependence is attributed to his observation on the characters of the structure. He defines international structure based on three features: anarchy as the ordering principle, functional differentiation and distribution of capability. On functional differentiation, he clearly states that units perform *similar* functions but are *different* in their ability to perform those functions. See Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (New York: Random House, 1979), chapter 5.

involved. Meanwhile, 'mutual sensitivity' refers to the condition where the parties' interests are not so deeply embedded, though there is still mutual influence, so that the value of the relationships is not so high among parties. This can occur because the parties concerned have alternative ways of obtaining what they want apart from their extant relations.<sup>9</sup> Increasing interdependence indicated by the former condition, nonetheless, can lead to paradoxical consequences. On the one hand, it expands the capacity of each actor to exercise their power over others. On the other hand, it also increases the cost of using that power because the vulnerability of the actor concerned to the possible reactions by the target actor also rises.<sup>10</sup>

That the situation where 'mutual dependency of states interests' exists in international relations is something that seems increasingly undeniable regardless of the degree of those interdependencies.<sup>11</sup> The problem now is whether or not this situation can facilitate power relations in favour of whom. There are also two views about this. First, power is most likely gained in asymmetric interdependence, where those who control desired resources are relatively independent; and when they can exert their power easily on those who are more dependent. This is very logical and many analysts accept it.<sup>12</sup> This does not mean that symmetric interdependence does not facilitate power relations. Yet, in asymmetric relations, power manipulation by the least dependent is higher than the others. Susan Strange's explanation about economic power seems to support this view. To her, states able to control access to factors of production, credit and market and other areas affecting economic transactions are in position to exercise their economic power.<sup>13</sup> With the resources they have, they can also set framework for stability and other rules of the game enabling them to pursue their interests.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>Richard Rosecrance "Interdependence" *The Oxford Companion to the Politics of the World*, 2e. Joel Krieger, ed. Oxford University Press Inc. 2001. *Oxford Reference Online*. Oxford University Press.

Australian National University. 11 May

2008 <<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t121.e0353>>.

See also debate about 'vulnerability' and 'sensitivity' in David Baldwin, "Interdependence and Power: A Conceptual Analysis", *International Organization*, Vol. 34, No. 4 (Autumn 1980), pp. 489-491.

<sup>10</sup> Oran Young, "Interdependencies in World Politics", in *Globalism versus Realism: International Relations' Third Debate* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1982), p. 73.

<sup>11</sup> Richard Rosecrance, "Interdependence".

<sup>12</sup> This view is best represented by Albert Hirschman, *National Power and the Structure of Foreign Trade* (Berkeley: University of California Press, 1945). This view is commonly accepted by many observers including Keohane and Nye. See Robert O. Keohane and Joseph Nye, "Power and Interdependence Revisited", *International Organization*, Vol. 41, No. 4 (Autumn 1987), pp. 725-753.

<sup>13</sup> Susan Strange, "What Is Economic Power and Who Has It?" *International Journal*, Vol. 30, No. 2 (Spring 1975), pp. 222-224.

<sup>14</sup> Ibid.

However, despite its commonsensical tone, this argument has been challenged by some analysts. And, this generates the second view to the debate about power relation. Wagner argues that asymmetric interdependence does not necessarily give relatively independent parties greater power over the dependent ones. This is because power is frequently situation-specific. Bargaining situation and marginal utility of the value negotiated between two interdependent parties are more influential on the bargaining outcome.<sup>15</sup> Moreover, the rising cost of using power as identified by Young can also restrict the ability of the least dependent parties to exert their leverage on the more dependent ones.<sup>16</sup>

The above two views suggest three factors that can facilitate power relations under interdependent situation. First, there is asymmetric interdependence where one party is relatively independent and control the resources needed by others. Second, the marginal utility of dependent parties on the resources controlled by relatively independent parties is high. Third, the bargaining situation does not enable the dependent parties to have alternative way to get resources except from the independent and controlling parties. How can these three factors explain China-ASEAN economic and power relations? This section will elaborate this issue.

### **China-ASEAN Economic Relations and Political Influence**

Most of analysts agree that China has been attempting to increase its interdependence with ASEAN countries. Although China is trying to develop its relations with ASEAN countries in all aspects, economic relations rather than politico-security relations are still its focus. This is because economic relations can give it more competitive advantage due to its huge economic resources being needed by the ASEAN countries to boost their development. With its stable high growth at 9-10 percent annually<sup>17</sup> and immense market with annual imports at an average US\$500 billion since 2001 in addition to about 10 million employment opportunity for other countries in the region, it can offer market benefits to the countries in need of economic resources to stimulate their economies after the Asian financial crisis in 1997-1998.<sup>18</sup> Moreover, by emphasising economic relations, the concession exchanges in its relations with ASEAN only involve market benefits which are not too costly compared with the

---

<sup>15</sup> R. Harrison Wagner, "Economic Interdependence, Bargaining Power, and Political Influence", *International Organization*, Vol. 42, No. 3 (Summer 1988), pp. 461-483.

<sup>16</sup> Oran Young, "Interdependencies in World Politics", p. 73

<sup>17</sup> Asian Development Bank, *Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries*, 2005 as cited by Yunhua Liu and Beoy Kui Ng, "Facing the Challenge of Rising Chinese Economy: ASEAN's Response", *Review of Development Economics* (June 2006), p. 23-36.

<sup>18</sup> Sheng Lijun, "China in Southeast Asia: the Limit of Power"

national sovereignty or territorial integrity it could risk in political security relations.<sup>19</sup>

China's attempt to intensify its relations with ASEAN is especially evident in the *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation* signed in November 2002. This framework devises the creation of an ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) within 10 years. In this agreement, most tariff reductions between China and ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand and Brunei Darussalam) will have been completed by 2010. While remaining ASEAN countries (Cambodia, Laos, Burma and Vietnam) have to phase these tariffs out until 2015.<sup>20</sup> To vindicate China's commitment to this cooperation, it also agreed to 'Early Harvest Package' in which China will grant a 3-year duty free entry for ASEAN goods into its markets before these ASEAN countries give it full free-tariff access to their markets. This concession provides early benefits for ASEAN countries and is expected to strengthen ASEAN confidence on China.<sup>21</sup>

Indeed, trade relations between China and ASEAN have increased moderately at approximately 19% annually since 1995.<sup>22</sup> Its imports from ASEAN have risen from \$12.4 billion in 1997 to \$89.5 billion in 2006. Meanwhile, its exports to the region also grew from \$12.7 billion to \$71.2 billion during the same period. Total ASEAN-China trade in 2006 reached \$160.9 billion, slightly less than that of ASEAN-US (\$168.5 billion). Though China registered a \$178 billion surplus with the world in 2006, it had \$18.2 billion deficit with ASEAN.<sup>23</sup> With the commencement of ACFTA, it is estimated that China's exports to ASEAN rise by 55.1% while its imports from ASEAN soar by 48%. Even though there will be competition in such sectors as textiles and apparel, electrical appliances and machinery, and other manufactures, overall the economies of the two parties will gain from this FTA.<sup>24</sup> With a common market of 1.7 billion people, its combined GDP will reach \$1.5-2 trillion.<sup>25</sup>

Besides growing trade relations, attempt to increase ASEAN's dependence on China is also done through its foreign aid to countries in

---

<sup>19</sup> Cheng-Chwee Kuik, "Multilateralism in China's ASEAN Policy", p. 12.

<sup>20</sup> Thomas Lum, Wayne M. Morrison, and Bruce Vaughn, "China's 'Soft Power' in Southeast Asia", *CRS Report for Congress* (Washington, D.C.: Congressional Research Service, Library of Congress, 2008), p. 14.

<sup>21</sup> Elizabeth Economy, "China's Rise in Southeast Asia: Implications for the United States", *Journal of Contemporary China*, Vol. 14, No. 44 (August 2005), p. 414.

<sup>22</sup> Bian Shen, "New Opportunity for China-ASEAN Trade", *Beijing Review* (1 May 2003), p. 18.

<sup>23</sup> Thomas Lum, et.al., "China's 'Soft Power' in Southeast Asia", p. 10.

<sup>24</sup> See "Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty-First Century", *ASEAN-China Expert Group Report on Economic Cooperation*, (October 2001), p. 152.

<sup>25</sup> See Jing-Dong Yuan, "China-ASEAN Relations: Perspectives, Prospects and Implications for US interests", *Research Report* (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, October 2006), p. 17.

the region. Data cited by Thomas Lum et al. demonstrate that since 1988 China has been pouring up to \$7 billion economic assistance to Burma.<sup>26</sup> It also offered \$91.5 million aid to Cambodia through the Consultative Group (CG) for Cambodia, a consortium of foreign aid directed by the World Bank. Additionally, for the 2007-2009 periods, it also pledged \$236 million in unspecified aid to the country.<sup>27</sup>

In Laos and Vietnam, China's foreign aid also play significant role for development of the countries. For example, in 2006 alone, China is reported to offer \$45 million aid to Laos.<sup>28</sup> Similarly, in Vietnam China also gave nearly \$200 million in grants and loans. However, it was stopped in 2006 because of the government's formal invitation to Taiwan to attend APEC Summit in Hanoi.<sup>29</sup>

China also provides aid to relatively developed ASEAN countries like Indonesia, Thailand and the Philippines. In 2005 for example, Indonesia received preferential loans worth \$300 million following the declaration of 'strategic partnership' by the presidents of the two countries. Thailand was also helped with \$49 million after it had been embargoed following the September 2006 military coup. Its generosity is extended as well to the Philippines with more than \$300 million aid and loans dispensed in 2003.<sup>30</sup>

Can these economic resources be translated into political influence, thus facilitating the achievement of China's strategic interests? So far, China has only two of the three requirements for effective power under interdependent relations between China and ASEAN. First, China has and controls huge economic resources like big markets, purchasing power and enormous capital needed by ASEAN. Second, marginal utility of ASEAN countries over these resources is high because they are badly needed for their economic development.<sup>31</sup> However, the third factor seems to

---

<sup>26</sup> Indeed, China has been the largest source of economic assistance to Burma since then. Of \$7 billion disbursed, \$2 billion are in the form of weaponry to support the ruling junta. The remaining \$5 billion are loan and infrastructure investment. Thomas Lum et al., "China's 'Soft Power' in Southeast Asia", p. 6.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> According to one report cited by Thomas Lum et al., in 2001-2002, China was the second biggest aid donor to Laos. Since the late 1990s, China has funnelled funds to this country in various forms ranging from critical grants to foreign direct investment. See *ibid.*

<sup>29</sup> Ibid, p. 7.

<sup>30</sup> Ibid, p. 8.

<sup>31</sup> The ASEAN's need for these resources from China increased particularly after the Asian Financial Crisis. ASEAN countries considered that during the crisis, it has lost many resources especially capital they need to recover. Though they got financial help from the IMF, the US and Japan, the value of this help was negated by the conditionality imposed on these countries. Besides, less sympathetic attitude showed especially by the US also disappointed them. See Joseph Yu-shek Cheng, "The ASEAN-China Free Trade Area: Genesis and Implications", *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 2 (June 2004), p. 274

complicate the matter. The strategic configuration apparently still enables some ASEAN countries to get economic resources from other sources like Japan or India. This is evident in the announcement of ASEAN-Japan Joint Declaration on Comprehensive Economic Partnership and an agreement to establish FTA between ASEAN and India in the same month when China-ASEAN signed the FTA agreement.<sup>32</sup> The problem is exacerbated further by the competitive nature of ASEAN-China economic relations in some sectors that can potentially hamper convergence of interests between the two parties, thus limiting the efficacy of economic resources as political instrument for achieving China's strategic goals.<sup>33</sup>

Nevertheless, the force of FTA, in the long run, may dwarf those difficulties. An analysis predicts the China-ASEAN FTA can generate 'investment creation effect' and 'regional division of labour based on trans-border production network facilitating trade in components and their ultimate assembly'.<sup>34</sup> This production network is created because MNCs' investments in China for component assembly, for example, can accelerate complementary investments in manufacturing elsewhere in the region.<sup>35</sup> Therefore, although competition may damage the economies of its ASEAN partners in the short run, there will be adjustments in production based on comparative advantage owned by each country.

Increasing potential for greater economic interdependence suggests an increasing convergence of interests among countries concerned, thus amplifying chance for mutual influence by the parties. Some preliminary evidence indicates that these economic ties to some extent have been successfully used by China for achieving its strategic interests. For example, it cancelled a major Singapore trade show in Shanghai in 2004 after Singapore PM resisted apologising for his private visit to Taiwan subsequently forcing him to declare Singapore's neutrality and affirm its

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> According to some experts, the lack of complementarity in the products of the two parties will impede the capacity of each party to absorb the products of other. With similar products scrambling for the same markets, it is highly possible that China's gains would come at the expense of ASEAN's. Indeed, this has aroused protests by some domestic producers outcompeted by China leading some ASEAN leaders to agree to deepen their integration to avoid being dominated by China. These suggest that interdependent relations between China and ASEAN will not automatically lead to China's untrammelled ability to control ASEAN. See John Wong and Sarah Chan, "China-ASEAN Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations", *Asian Survey*, Vol. 43, No. 3 (May/June 2003), p. 508; and Hugh De Santis, "The Dragon and the Tigers: China and Asian Regionalism", *World Policy Journal* (Summer 2005), pp. 27-28

<sup>34</sup> John Ravenhill, "Is China An Economic Threat to Southeast Asia?" *Asian Survey*, Vol. 46, Iss.5 (Sept/Oct 2006), pp. 664-669.

<sup>35</sup> After all, cost of production and market potential are the main considerations for investments by MNCs. By building production network in the region, they can minimise the transportation cost, accelerate the production process and quicken the delivery of products to the markets. Therefore, the potential for this regional division of labour is very big.



'one-China policy'.<sup>36</sup> China also handed Indonesia a 20-year, \$8.4 billion LNG contract for Indonesia's cancellation of proposed visit by Taiwan's president in December 2002.<sup>37</sup> These intimate that at least in the mind of China's leaders, economic interdependence is transmutable to political influence.

Closer economic engagement between China and ASEAN has also been able to erase the image of "China threat" in Southeast Asia. A survey in Bangkok for example, shows that 76% people regard China as Thailand's closest friend. Growing investments in strategic sectors in several ASEAN countries up to 40% annually also suggest that China is no longer considered as threat. Rather, it is a benign power.<sup>38</sup> Its decline to devalue its currency during the Asian financial crisis, likewise increasingly strengthen its image as responsible great power in the region.<sup>39</sup> Moreover, the acceptance of ASEAN countries to China's demand in order not to involve external powers in their disputes with China over Spratly can further indicate the countries' willingness to maintain conducive relations with China.<sup>40</sup> All these suggest that to certain extent, economic interdependence can facilitate political influence by the dominant party (China) over others relatively dependent on it.

## Conclusion

Departing from the debate about interdependence and its effectiveness as power instrument, this paper argue that increasing economic interdependence between China and ASEAN can enable it to exercise its power over its ASEAN neighbours. Some facts enumerated here support this argument. Nevertheless, the ability of China to influence the ASEAN countries is not unlimited. From the three conditions for effective power influence under interdependence, only two that China clearly has namely, economic resources and large marginal utility of ASEAN countries to the economic resources. The last condition is not met because strategic configuration and competition between China and ASEAN in some products can enable ASEAN countries to get the same valuable resources

---

<sup>36</sup> Dana R. Dillon and John J. Tkacik, Jr., "China and ASEAN: Endangered American Primacy in Southeast Asia", *Backgrounder*, No. 1886 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation, 19 October 2005), p. 4. available at [www.heritage.org/research/asiaandthepacific/bg1886.cfm](http://www.heritage.org/research/asiaandthepacific/bg1886.cfm)

<sup>37</sup> See Brian Andrews et al., "Chinese Economic Growth and Political Influence: Examining PRC Relations with Australia, Indonesia, Malaysia and Singapore", *Research Report* (New Jersey: Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, January 2007), p. 15.

<sup>38</sup> Philip P. Pan, "China's Improving Image Challenges US in Asia", *Washington Post*, Saturday, 15 November 2003, p. A01.

<sup>39</sup> See David Shambaugh, "China Engages Asia: Reshaping the Regional Order", *International Security*, Vol. 29, No. 3 (Winter 2004/2005), p. 68.

<sup>40</sup> Cheng-Chwee Kuik, "Multilateralism in China's ASEAN Policy", p. 14.

as what China offers from other countries. Consequently, this can affect the bargaining setting and their marginal utility towards China's offer. If ASEAN can get more market from India, for example, the value of China's market to some extent can diminish. Therefore, this last condition is said to impair China's power over the region.

However, if we look carefully, the long run tendency stimulated by FTA can negate the consequence of the interdependence impediments. FTA will gradually intensify economic relations through production networks and production specialisation in the region so that potential for power relations still exist between the China and ASEAN.

## Reference

- Acharya, Amitav, "Seeking Security In the Dragon's Shadow: China and Southeast Asia in the Emerging Asian Order", *Working Paper*, No. 44 (Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 2003).
- Andrews, Brian et al., "Chinese Economic Growth and Political Influence: Examining PRC Relations with Australia, Indonesia, Malaysia and Singapore", *Research Report* (New Jersey: Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, January 2007), p. 15.
- Cheng-Chwee Kuik, "Multilateralism in China's ASEAN policy", *SAIS Working Paper Series WP/05/03* (Washington: Paul Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University, 2003), p. 2.
- Baldwin, David, "Interdependence and Power: A Conceptual Analysis", *International Organization*, Vol. 34, No. 4 (Autumn 1980), pp. 489-491.
- Bian Shen, "New Opportunity for China-ASEAN Trade", *Beijing Review* (1 May 2003), p. 18.
- De Santis, Hugh, "The Dragon and the Tigers: China and Asian Regionalism", *World Policy Journal* (Summer 2005), pp. 27-28.
- Dillon, Dana R. and John J. Tkacik, Jr., "China and ASEAN: Endangered American Primacy in Southeast Asia", *Backgrounder*, No. 1886 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation, 19 October 2005), p. 4, available at [www.heritage.org/research/asiaandthepacific/bg1886.cfm](http://www.heritage.org/research/asiaandthepacific/bg1886.cfm)
- Economy, Elizabeth, "China's Rise in Southeast Asia: Implications for the United States", *Journal of Contemporary China*, Vol. 14, No. 44 (August 2005), p. 414.
- "Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty-First Century", *ASEAN-China Expert Group Report on Economic Cooperation*, (October 2001), p. 152.

- Hirschman, Albert, *National Power and the Structure of Foreign Trade* (Berkeley: University of California Press, 1945).
- Jing-Dong Yuan, "China-ASEAN Relations: Perspectives, Prospects and Implications for US interests", *Research Report* (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, October 2006), p. 17.
- John Wong and Sarah Chan, "China-ASEAN Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations", *Asian Survey*, Vol. 43, No. 3 (May/June 2003), p. 508.
- Joseph Yu-shek Cheng, "The ASEAN-China Free Trade Area: Genesis and Implications", *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 2 (June 2004), p. 274.
- Keohane, Robert O., "Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics", in *International Institutions and State Power* (Boulder: Westview Press, 1989), pp. 1-20.
- Keohane, Robert O. and Joseph Nye, "Power and Interdependence Revisited", *International Organization*, Vol. 41, No. 4 (Autumn 1987), pp. 725-753.
- Oran Young, "Interdependencies in World Politics", in *Globalism versus Realism: International Relations' Third Debate* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1982), p. 73.
- Pan, Philip P., "China's Improving Image Challenges US in Asia", *Washington Post*, Saturday, 15 November 2003, p. A01.
- Ravenhill, John, "Is China An Economic Threat to Southeast Asia?" *Asian Survey*, Vol. 46, Iss.5 (Sept/Oct 2006), pp. 664-669.
- Rosecrance, Richard, "Interdependence" *The Oxford Companion to the Politics of the World*, 2e. Joel Krieger, ed. Oxford University Press Inc. 2001. *Oxford Reference Online*. Oxford University Press. Australian National University. 11 May 2008 <<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t121.e03533>>.
- Roy, Deny, "Hegemon on the Horizon? China's Threat to East Asian Security", *International Security*, 19:1 (Summer 1994), pp. 149-168
- Shambaugh, David, "China Engages Asia: Reshaping the Regional Order", *International Security*, Vol. 29, No. 3 (Winter 2004/2005), p. 68.
- Sheng Lijun, "China in Southeast Asia: the Limits of Power", *Japan Focus*, August 4, 2006. see <http://japanfocus.org/products/topdf/2184>.
- Strange, Susan, "What Is Economic Power and Who Has It?" *International Journal*, Vol. 30, No. 2 (Spring 1975), pp. 222-224.
- Thomas Lum, Wayne M. Morrison, and Bruce Vaughn, "China's 'Soft Power' in Southeast Asia", *CRS Report for Congress* (Washington, D.C.: Congressional Research Service, Library of Congress, 2008), p. 14.

- Wagner, R. Harrison, "Economic Interdependence, Bargaining Power, and Political Influence", *International Organization*, Vol. 42, No. 3 (Summer 1988), pp. 461-483.
- Waltz, Kenneth, "The Myth of National Interdependence", in *Globalism Versus Realism: International Relations' Third Debate* (Boulder: Westview Press, 1982), p. 91
- Waltz, Kenneth, *Theory of International Politics* (New York: Random House, 1979), chapter 5.
- Yunhua Liu and Beoy Kui Ng, "Facing the Challenge of Rising Chinese Economy: ASEAN's Response", *Review of Development Economics* (June 2006), p. 23-36.
- Zakaria, Fareed, *From Wealth to Power: the Unusual Origin of America's World Role* (New Jersey: Princeton University Press, 1998)

## **Bangkitnya Gerakan Sosial di Bolivia**

**Emil Radhiansyah, S.IP, M.Si<sup>1</sup>**

### **Abstract**

*Social movement now has become an interest issue for scholars either political studi or international relations. What had happened in Latin America during year 2000-2007 and in Thailand recently had show to us that people is not just as a suffering object of the state, they also as a subject of political power. The raising of Evo Morales and the deadlock negotiation between the red shirt and the Government of Thailand that impact in Thailand economy has shock the world. The raising Evo Morales as the first indigenous President of Bolivia also had shown the raising of new social movement with new ideological of new socialism.*

### **A. Pendahuluan**

Bolivia merupakan sebuah Negara di Amerika Latin yang baru-baru ini banyak mendapatkan sorotan atas kebijakan yang diambil oleh kepala Negara terpilih yaitu Evo Morales. Negara tidak berpantai ini yang berbatasan langsung dengan Brazil, Chili, Peru dan Argentina ini, merupakan Negara no 2 penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di Amerika Latin setelah Venezuela. Dimana cadangan gas alamnya sebesar 54 kubik triliun (Trillion Cubic Feet / Tfc), sementara produksi dan ekspor negara ini mencapai 26,7 Tfc pada akhir tahun 2004 lalu dan terus mengalami kenaikan.<sup>2</sup>

Walaupun sebagai Negara yang memiliki cadangan minyak terbesar ke 2 setelah Venezuela di Amerika Latin, hal ini tidak menjadi jaminan akan adanya kehidupan yang layak dan memadai bagi rakyat Bolivia. Penduduk Bolivia yang terdiri dari beberapa suku bangsa Indian yaitu Quecha 30%, Aymara 25%, Mestizo 30% (campuran Indian dan eropa) serta bangsa eropa sebesar 15%, ternyata tidak hidup dalam harmonisasi. Hal ini dikarenakan adanya keberpihakan pemerintah Bolivia terhadap penguasaan asing terhadap sektor-sektor kehidupan rakyat banyak di Bolivia. Kebijakan perekonomian yang kerap kali tidak populer, terus diambil sejak Negara ini mengalami kegagalan perekonomian pada era 1980-an dengan tingkat hutang hutang mencapai 3,8 milyar dolar di tahun 1982.<sup>3</sup> hal ini dipicu tebagai akibat dari krisis perekonomian yang

---

<sup>1</sup> Dosen Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta

<sup>2</sup> Samuel Logan, *Bolivia's Energy Nationalization Causes Concern in Brazil and Argentina*, di akses dari [http://pinr.com/report.php?ac=view\\_report&report\\_id=485](http://pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=485), pada 03 oktober 2006 pukul 19.29.

<sup>3</sup> Benjamin H. Kohl and Linda C. Farthing, *Impasse in Bolivia; Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*, 2006, hlm. 54-55.

terjadi di Mexico dan menjalar di Amerika terutama Negara-negara di Amerika Latin.

Kegagalan perekonomian serta krisis perekonomian yang parah menyebabkan banyak investor pada masa itu khawatir dan menarik diri dari Bolivia, hal ini di tanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 21060 tentang memperbesar peranan swasta dalam perekonomian, pemotongan gaji pegawai sektor publik, pemecatan terhadap 35 ribu pekerja tambang dan penutupan unit bisnis Negara.<sup>4</sup> Tentunya hal ini tidak terlepas dari peranan IMF ( *International Monetary Fund* ), *World Bank* serta IADB (*Inter-American Development Bank*), terutama dalam hal pengambilan keputusan oleh Kepala Pemerintahan untuk mengatasi krisis ekonomi yang menimpa, merujuk kepada *Structural Adjustment Program* (SAP).

Adalah Gonzalo Sanchez de Lozada yang menerapkan secara utuh kebijakan SAP, setelah terpilih menjadi Presiden tahun 1993, kebijakan yang di ambil adalah penerapan perundang-undangan Kapitalisasi yang berdampak sangat besar bagi rakyat Bolivia. <sup>5</sup> perundang-undangan ini berisi mengenai otorisasi penjualan minyak dan gas, perusahaan telekomunikasi, perusahaan penerbangan, perusahaan listrik, perusahaan kereta api serta perusahaan pengelolaan bijih besi. Otorisasi tersebut berupa penguasaan swasta terhadap penjualan hasil-hasil produksi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Pengambilan kebijakan tersebut ternyata terbukti ampuh untuk meningkatkan perekonomian Bolivia antara lain meningkatnya penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment / FDI*) menjadi 1.7 milyar dollar AS, serta meningkatnya ekspor dari 652 juta dollar AS menjadi 1.3 milyar dollar AS pada tahun 2002.<sup>6</sup>

Pertumbuhan perekonomian dan peningkatan ekspor tersebut selain dilaksanakannya program SAP juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Biglaiser<sup>7</sup> mengenai masuknya investasi asing langsung yaitu dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain;

1. Perbaikan Ekonomi
2. Kondisi Makro Ekonomi
3. Pelaksanaan management yang benar

Ketiga hal tersebut dalam pengertian Biglaiser di bagi menjadi 5 hal yang saling berkaitan yaitu:

1. Liberalisasi Permodalan Nasional
2. Liberalisasi Permodalan Internasional
3. Pengurangan Tarif

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 65-66.

<sup>5</sup> Jeffrey Sachs, *The End of Poverty*, Penguin, 2005, hlm 90-108.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Glen Biglaiser, *Latin American Research Review*: 2006; 41; Academic Research Library, hlm 55.

4. Pengurangan Pajak
5. Swastanisasi / Privatisasi

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bolivia terhadap masuknya investasi asing menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Bolivia yaitu terbatasnya gerak masyarakat Bolivia untuk mendapatkan hak-haknya atas barang publik dan terjadinya pemecatan masal terhadap para pekerja. Hal ini dikarenakan akses yang didapatkan oleh masyarakat umum terhadap barang publik terhalang dan memiliki batasan yang tinggi. Kepemilikan atas barang publik oleh swasta menyebabkan swasta dapat secara leluasa menerapkan tarif yang mereka hendaki, apalagi undang-undang yang baru melindungi kepentingan dan kepemilikan swasta.

Sebagai akibat rendahnya akses masyarakat umum atas barang publik apalagi perlindungan negara terhadap swasta yang begitu besar menyebabkan timbulnya aksi unjuk rasa dan protes dari rakyat yang berakhir dengan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa pada tahun 2000. aksi tersebut merupakan cerminan dari rasa marah dan kecewa terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Bolivia. Salah satu aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat Bolivia yaitu menuntut penghapusan kebijakan privatisasi air dan membatalkan kontrak pengelolaan air oleh Perusahaan Bechtel.<sup>8</sup>

Gerakan protes terhadap kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gonzalo Sanchez de Lozada terus berlangsung termasuk gerakan protes rakyat terhadap kebijakan minyak dan gas alam yang menuntut nasionalisasi perminyakan dan gas alam Bolivia. Gerakan ini akhirnya membuat perubahan besar dalam pemerintahan dan kebijakan Bolivia dan menjadi kunci dalam Gerakan Sosial di negara itu.<sup>9</sup>

Di bawah kepemimpinan Evo Morales dan Filemon Escobar serta didukung oleh 21 organisasi berhasil membuat pemerintah melemah dan berakhir dengan pengunduran diri Gonzalo Sanchez de Lozada pada 17 Oktober 2005. Gerakan ini pula yang mengantarkan Evo Morales menjadi Presiden terpilih Bolivia setelah melalui pemilihan umum pada Desember 2005 dan membuat terkejut investor dengan kebijakan memberlakukan nasionalisasi pada 1 Mei 2006.

Untuk mengetahui lebih lanjut Sejauh Mana Gerakan Sosial Baru Berpengaruh Terhadap Kebijakan Nasionalisasi Bolivia Khususnya Pada Tahun 2006, maka akan diuraikan beberapa kerangka teori yang menunjang penulisan ini.

---

<sup>8</sup> Benjamin H. Kohl and Linda C. Farthing *Loc. Cit.* Hlm. 165.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Sejak berakhirnya Perang Dingin dalam menganalisis fenomena hubungan antarnegara, studi hubungan internasional telah mengalami banyak perkembangan. Seiring dengan meningkatnya peranan aktor lain baik individu maupun lembaga non-pemerintah membuat peranan negara sebagai aktor yang dominan dalam proses pengambilan keputusan mengalami penurunan. Begitu juga dengan isu yang menjadi sorotan masyarakat internasional, bergeser dari isu-isu yang bersifat kerjasama militer ke arah isu-isu ekonomi dan sosial.

Menurut Charles Tilly,<sup>10</sup> Gerakan Sosial merupakan rentetan perdebatan dan kampanye yang dilakukan secara kolektif oleh rakyat terhadap pihak lain, yang merupakan partisipasi rakyat dalam dunia politik. Terdapat 3 (tiga) elemen dalam pergerakan sosial menurut Tilly<sup>11</sup>, yaitu :

1. *Campaigns : a sustained, organizes public effort making collective claims on target authorities;*  
( Kampanye yang merupakan usaha-usaha untuk menggalang dan mendapatkan dukungan publik. )
2. *Social Movement repertoire: employment of combinations fom the among coalitions, public meetings, solemn processions, vigils, rallies, demonstrations, petition drives, statement to and media public, and pamphleteering;*  
( Rangkaian rencana aksi gerakan social dengan melakukan koalisi, pertemuan public, demonstrasi, membuat petisi, membuat pernyataan publik di media serta penyebaran pamphlet. )
3. *WUNC display: participants conserted public representation of Worthiness, Unity, Numbers and Commitments on the part of themselves and/or their constituencies.*  
( Mendorong partisipasi publik yang menggambarkan Perjuangan, Persatuan, Massa dan Komitmen.)

Sementara itu Sidney Tarrow mendefinisikan pergerakan sosial sebagai tantangan kolektif ( kepada elit poltik, pemerintah, kelompok-kelompok ) oleh sekelompok orang. Dengan tujuan serta solidaritas yang sama dan secara terus-menerus melakukan interaksi dengan elit-elit politik, lawan politik serta pemerintahan.

---

<sup>10</sup> Charles Tilly, "Social Movement, 1768-2004", Boulder, CO, Paradigm Publisher, 2004, hlm.3. Diakses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Social> Movement, opened at 04 Desember 2006 at 09.01 am.

<sup>11</sup> *Ibid.*



Tarrow bahkan membedakan antara Gerakan Sosial dari partai politik ataupun kelompok kepentingan.<sup>12</sup> Menurut Tarrow gerakan sosial bukanlah kelompok kepentingan ataupun partai politik yang mempunyai tujuan politis, akan tetapi merupakan gerakan yang timbul secara sadar dan spontan oleh rakyat.

Tumbuhnya Gerakan Sosial secara umum dilatarbelakangi oleh :<sup>13</sup>

1. Proses urbanisasi
2. Proses industrialisasi
3. Pendidikan massa, dan
4. Penyebaran gagasan demokrasi dan hak-hak politik seperti kebebasan berbicara dan berorganisasi.

Bolivia merupakan negara yang sedang berkembang di Amerika Latin, sebagai negara berkembang sehingga apa yang telah disebutkan diatas terjadi di Bolivia. Namun apa yang disebutkan oleh Tarrow mengenai Gerakan Sosial bukanlah sebuah gerakan atau kelompok kepentingan ataupun partai politik yang tidak mempunyai tujuan politis, justru sebuah Kelompok Kepentingan atau Partai Politik terlahir dari gerakan ini. Namun memang benar bahwa Gerakan Sosial merupakan gerakan yang timbul secara sadar dan spontan yang dilakukan oleh rakyat.

Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia adalah gerakan yang memang secara sadar dan spontan dilakukan oleh rakyat Bolivia dan memiliki tujuan politis dan khususnya ekonomi. Dengan kata lain, Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia dalam hal ini dipelopori oleh partai politik MAS tempat Evo Morales berpijak yang memiliki tujuan politis, yaitu menggantikan suatu sistem yang ada di Bolivia yang mana sistem tersebut merugikan dan telah menyebabkan kemiskinan rakyat Bolivia.

Ideologi Neoliberalisme yang dituding sebagai penyebab terjadinya kemiskinan rakyat Bolivia, mungkin merupakan penyebab utama timbulnya perotes oleh rakyat. Partai Politik MAS dibawah kepemimpinan

---

<sup>12</sup> Sidney Tarrow, "Power and Movement: Collective Action and Social Movement and Politics", Cambridge University Press, 1994, diakses dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Social Movement](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Movement), opened at 04 Desember 2006 at 09.01 am.

<sup>13</sup> Fadillah Putra, dkk., *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, dalam buku seri Demokrasi II Program Penguatan Simpul Demokrasi, Juli 2006, hlm.6. Prose urbanisasi dari daerah ke kota-kota besar sebagai dampak dari terjadinya proses industrialisasi menyebabkan terjadinya interaksi orang dari berbagai macam latar belakang social yang menghasilkan terjadinya pengelompokan antara buruh dan pemilik modal di mana kelompok buruh menuntut hak-hak sosial ekonomi mereka sedangkan pemilik modal biasanya memiliki kekuatan dalam melobi kekuasaan politik sehingga menghasilkan kebijakan yang menguntungkan sepihak, sementara proses pendidikan massa membawa orang-orang untuk bertemu dan berkumpul baik melalui berbagai macam media massa, teknologi ( internet, dll ) ataupun pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi telah menimbulkan kesadaran pada masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan sebagai bagian dari masyarakat internasional, apalagi didukung dengan penyebaran gagasan demokratik dan hak-hak politik, di mana individu maupun kelompok masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.

Evo Morales berusaha membebaskan rakyat Bolivia dari eksploitasi terhadap kekayaan alam Bolivia oleh pihak asing dengan melakukan nasionalisasi terhadap sebagian besar perusahaan negara diantaranya perusahaan minyak dan gas alam, perkebunan koka, telekomunikasi, kereta api, listrik, biji besi, penerbangan dan perusahaan air minum negara.

Dengan demikian, Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia adalah gerakan yang memiliki tujuan politis dan ekonomi, yang bertujuan untuk merubah sistem yang ada dari neoliberal menuju sosialisme dengan tujuan menuju kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik di Bolivia.

Menurut para ahli sosiologis, dalam perkembangannya Gerakan Sosial dibedakan menjadi beberapa tipe salah satunya adalah tipe Gerakan Sosial Lama dan Gerakan Sosial Baru. Buechler, melihat Gerakan Sosial Lama atau dikenal dengan Gerakan Sosial Tradisional adalah tipe gerakan yang mengikuti paradigma Marxis yang lebih melihat kepada permasalahan ekonomi sehingga melahirkan gerakan buruh.<sup>14</sup> Dikarenakan fokus Gerakan ini yang banyak di ilhami oleh ideologi sosialis-marxisme, menyebabkan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat pada tipe Gerakan Sosial Lama terbatas pada kelas-kelas sosial tertentu yaitu kelas buruh, tani (pada negara komunis) dan kaum miskin desa dan kota, karena hal-hal yang diperjuangkan adalah hal-hal yang bersifat materialistis yaitu kepada peningkatan standar hidup serta penyamaan hak-hak antar kelas sosial.

Sedangkan Gerakan Sosial Baru merupakan bentuk gerakan protes masyarakat yang beranggotakan kelompok-kelompok lokal tertentu yang saling berjejaring dan tidak terkait dengan massa dari suatu partai politik atau perserikatan dan memiliki cara tersendiri dalam melakukan aksi protesnya.<sup>15</sup> Tujuan gerakan ini bersifat non-materialistik. Rajendra Singh menyatakan beberapa pendapat mengenai karakteristik dari Gerakan Sosial Baru seperti yang dikutip dari Sunarko:<sup>16</sup>

1. Gerakan Sosial Baru menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh; ruang sosialnya mengalami penciutan dan aspek masyarakat sipil tengah digerogeti oleh kemampuan kontrol negara.
2. Gerakan Sosial Baru mengesampingkan istilah perjuangan kelas.
3. Gerakan Sosial Baru mengabaikan model organisasi serikat buruh dan model politik kepartaian, di mana gerakan ini secara umum merespons tanggapan dari masyarakat sipil.
4. Struktur Gerakan Sosial Baru didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak, orientasi dan oleh heterogenitas basis sosial.

<sup>14</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Social Movement](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Movement), opened at 04 Desember 2006 at 09.01 am.

<sup>15</sup> Fadillah Putra, dkk., *Op.Cit.*, hlm.63.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 65-67.

Menurut Fadillah Putra bahwa Gerakan Sosil Baru berorientasi kepada sebuah penciptaan tatanan baru dalam masyarakat yang lebih berkeadilan sosial, oleh karenanya sifat perjuangannya selalu menentang status quo, anti sistem dan selalu memadukan tuntutan akan perubahan tatanan sosial, politik dan ekonomi.<sup>17</sup>

Di Eropa Gerakan Sosial Baru dipandang sebagai sebuah perjuangan yang bergerak di ranah publik. Gerakan ini tidak didasarkan kepada perjuangan kelas tertentu, namun aksi ini muncul lebih kepada aksi kolektif yang menghasilkan suatu nilai-nilai strategis yang pada akhirnya menekan kekuasaan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan pada nilai-nilai dan identitas sosial.<sup>18</sup>

Tourine<sup>19</sup> melihat Gerakan Sosial Baru timbul sebagai akibat penguasaan atas pasar, komunikasi dan media sebagai bentuk penguasaan negara atas teknologi dan korporasi ekonomi, yang dianggap sebagai bentuk pengurangan kebebasan. Hal ini di karenakan Gerakan Sosial Baru ( GSB ) yang dilihat Tourine adalah gerakan sosial yang tumbuh dari masyarakat pasca industri, di mana dalam masyarakat yang tumbuh secara terstruktur tersebut membawa budaya baru. Dalam sistem hirarki masyarakat tersebut terjadi hubungan-hubungan konflik yang melibatkan norma dan nilai sosial. Lebih lanjut Tourine membagi konflik dalam beberapa tipologi masyarakat modern.<sup>20</sup> Yaitu :

1. Masyarakat Komersial adalah masyarakat yang terbudaya untuk terus berubah dan memiliki tipe untuk melakukan investasi dalam hal pendistribusian barang. Konflik yang terjadi di dalamnya adalah konflik dalam mendapatkan kebebasan sipil dan hak politik.
2. Masyarakat Industrial adalah masyarakat yang terbudaya untuk melakukan produksi dan memiliki bentuk investasi yang merubah alat-alat produksi dan struktu organisasi pekerjaan. Konflik yang terdapat di dalamnya adalah konflik antara pemilik modal dan buruh.
3. Masyarakat Pacsa Industri adalah masyarakat yang melakukan penanaman modal pada level manajemen produksi dan dominasi kelas masyarakat berdasarkan pada monopoli proses dan ketersediaan data dan mengontrol kehidupan berorganisasi dan alat-alat produksi. Konflik yang terjadi pada masyarakat ini tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>18</sup> Eduardo Canel, "New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need for Integeration", diperoleh dari <http://www.idre.ca/en/ev/-54446-201-1-1-DOTOPIC.html>, pada tanggal 27 Februari 2007, pukul 23.32 wib.

<sup>19</sup> Pasuk Phongpaichit, "Theories of Social Movements and Their Relevance for Thailand", dia akses dari <http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theorysocmovt.doct>, pada tanggal 8 maret 2007, pukul 16.52.

<sup>20</sup> Eduardo Canel; Op.Cit.

lagi untuk mendapatkan hak-hak politik tetapi lebih kepada simbol-simbol produksi.

Habermas<sup>21</sup> melihat perkembangan struktur negara dan ekonomi pasar yang merupakan sebuah mekanisme pengendalian terhadap masyarakat yang disebut sebagai sistem integration, yang menyebabkan kolonialisasi terhadap ruang lingkup publik dan individu yang disebut social integration. Dalam pandangan Habermas gerakan sosial di pandang sebagai sebuah reaksi pembelaan terhadap ruang lingkup publik dan individu daripada sistem negara dan ekonomi pasar yang berlaku. Sementara Offe<sup>22</sup> menjelaskan kebangkitan GSB sebagai konteks kehidupan masyarakat kapitalis yang memandang negara sebagai sebuah jaring kendali atau steering mechanism yang merupakan sebuah bentuk pengamanan yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar. Hal ini disebabkan karena pemberian kepercayaan dari negara kepada kaum pemilik modal untuk mengelola perekonomian sehingga negara menciptakan aturan-aturan untuk mempermudah berjalannya sistem tersebut tanpa mengindahkan norma dan nilai sosial publik yang telah terbentuk.

GSB berdasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas merupakan sebuah tindakan kolektif yang menentang pelanggaran politik dan kekuasaan ekonomi serta berusaha mengubah institusi negara dan pasar untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik<sup>23</sup>. GSB melibatkan aktor-aktor non kelas seperti yang terjadi pada Gerakan Sosial Lama, mereka yang terlibat berasal dari kalangan masyarakat umum baik kelas menengah ataupun bawah, mahasiswa dan kalangan terdidik.

Di Amerika pola gerakan sosial yang terjadi lebih di kenal dengan sebutan Resources Mobilitation ( RM ) karena gerakan ini lebih menumpukan kepada besar kecilnya sumber-sumber yang didapatkan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politisnya. Gerakan sosial yang merupakan tipe RM bergerak dari ranah publik ke ranah politik di karenakan tujuan RM adalah mengubah tatanan politik yang terjadi. Fokus dari kajian ini terletak pada proses kontekstual seperti manajemen pengambilan keputusan, dinamisasi organisasi serta perubahan politik yang menghasilkan potensi akhir organisasi.

Sumber-sumber yang di maksud dalam gerakan sosial RM merujuk kepada material yang didapatkan seperti pendanaan, dan keanggotaan serta kesempatan-kesempatan politis yang timbul. Oleh karena dalam teori ini terdapat 4 ( empat ) syarat dalam proses mobilisasi, yaitu :

---

<sup>21</sup> Pasuk Phongpaichit., Loc. Cit.

<sup>22</sup> Eduardo Canel., Op. Cit.

<sup>23</sup> Pasuk Pongpaichit..., Op. Cit

1. Bentuk organisasi
2. Kepemimpinan dalam organisasi
3. Kesempatan politik yang ada
4. Sifat institusi politik

Tilley melihat usaha organisasi gerakan sosial baru untuk memasuki ranah politik bukanlah merupakan suatu usaha untuk menentang sistem politik yang sudah ada namun hanyalah merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa kelompok untuk turut serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan.<sup>24</sup>

Gerakan sosial yang muncul di Amerika Latin memiliki beberapa karakteristik<sup>25</sup>, yaitu:

1. Gerakan sosial merupakan gerakan urban sebagai hasil proses urbanisasi yang cepat selama perkembangan perindustrian, kapitalisasi agrikultur dan migrasi dari desa ke kota.
2. Adanya serikat kerja yang memunculkan aktor sosial baru seperti kelompok kewanitaan, asosiasi guru dan mahasiswa, kelompok-kelompok etnis dan kelompok pembela lingkungan.
3. Gerakan sosial tersebut berupaya untuk mendapatkan keadilan.
4. Gerakan sosial yang ada terlibat dalam kompetisi dalam mendapatkan kuasa mengontrol alat politik.

### **C. Gerakan Sosial di Bolivia**

Gerakan sosial yang terjadi di Bolivia merupakan kombinasi antara gerakan sosial baru dan gerakan sosial RM. Hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat, kelompok pekerja dan organisasi-organisasi partai politik yang terlibat dalam setiap aksi-aksi protes yang terjadi di Bolivia selama masa pemerintahan yang berideologikan neoliberalisme.

Mereka yang terlibat antara lain Konfederasi Pekerja Bolivia (COB / Confederation Obrera Boliviana), Indigenas Pachakuti Movement (MIP), MAS (Movimiento Al Socialismo). Robert Barr menyebutkan bahwa gerakan yang terjadi di Bolivia disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu kegelisahan masyarakat atas kebijakan perekonomian negara, hasil pemilu, dan sikap tidak kepercayaan terhadap kongres.<sup>26</sup>

Seperti yang di sebutkan oleh Habermas, Offe, Tourine yang menyatakan bahwa gerakan sosial terjadi di akibatkan tekanan negara terhadap ranah publik, dan bukan hanya semata tekanan politis biasa, namun adanya peranan dari organisasi internasional dan multinasional di bawah bendera ideologi neoliberalisme. Paham ini berkembang dari

---

<sup>24</sup> Eduardo Canel., Op. Cit.

<sup>25</sup> Pasuk Pongpaichit., Op. Cit

<sup>26</sup> Robert R. Barr, Bolivia : Another Uncompleted Revolution, Latin American Politics and Society: Fall 2005: 47,3; *Academic Research Library*, hlm. 69.

pemikiran liberalisme yang melihat negara sebagai aktor yang tidak di anggap terlalu penting dalam mekanisme pasar. Perwujudannya melalui suatu konsensus yang di sepakati oleh beberapa institusi seperti IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS yang di sebut dengan konsensus Washington.<sup>27</sup>

Pengejawantahan dari Washington Konsensus adalah SAP (Structural Adjustment Program) dengan 10 (sepuluh) ketentuan antara lain :<sup>28</sup>

1. Pengurangan pengeluaran publik;
2. Liberalisasi keuangan dengan suku bunga yang di tentukan pasar;
3. Liberalisasi perdagangan di sertai penghapusan izin impor dan pengurangan tarif;
4. Mendorong investasi asing langsung;
5. Privatisasi BUMN;
6. Deregulasi ekonmi;
7. Nilai tukar yang kompetitif;
8. Penjaminan disiplin fiskal dan pengendalian devisit anggaran;
9. Reformasi pajak;
10. Perlindungan hak cipta;

Paham inilah yang di adaptasi oleh negara-negara berkembang di Amerika Latin seperti Bolivia yang meinginkan pertumbuhan ekonomi atas dasar tekanan World Bank dan IMF dan merupakan kebijakan perekonomian nasional mereka.

Privatisasi perusahaan negara merupakan bentuk bukti nyata dari implementasi salah satu dari tiga pilar utama neoliberalisme atau Konsensus Washington yang selalu terkandung di dalam setiap butir kondisionalitas yang di tekankan IMF kepada negara-negara berkembang.

Alasan mendasar kebijakan privatisasi dilakukan oleh negara karena pengelolaan oleh sektor swasta memungkinkan efisiensi alokasi sumber daya guna memaksimalkan laba, dibandingkan dengan pemerintah yang dalam tindakannya cenderung diwarnai motif kepentingan politik dan hal lain yang tidak efisien.

Menurut Katherine Fierlbeck, bahwa demokrasi merupakan dasar yang secara langsung mendukung terciptanya kondisi kondusif terhadap pasar.<sup>29</sup> kebijakan Neoliberal yang berjalan di Bolivia di anggap sebagai sumber malapetaka bagi rakyat Bolivia, kebijakan privatisasi yang

---

<sup>27</sup> Syamsul Hadi dkk, Washington Konsensus dan Politik Privatisasi di Indonesia, Margin Kiri, Jakarta 2007, hlm. 13.

<sup>28</sup> Colin Parkins, "A Post Washington Concensus", diakses dari [www.cseweb.greennet.org.uk/downloads/parkins.pdf](http://www.cseweb.greennet.org.uk/downloads/parkins.pdf), pada tanggal 11 April 2007 pukul 04.58 am wib

<sup>29</sup> Syamsul Hadi, dkk., *Loc., Cit., hlm.38-39.*

dikondisionalitaskan IMF di Bolivia, membuka peluang bagi penguasaan aset strategis nasional oleh para pemodal asing. Selain itu dominasi ini telah menyebabkan terjadinya arus modal dan teknologi yang sangat cepat namun menciptakan struktur ekonomi yang bersifat oligopolistik yang berujung pada terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sektor ekonomi strategis suatu negara.<sup>30</sup>

Gerakan Sosial menurut para ahli memiliki pengertian dan pembagian yang berbeda-beda dan di masing-masing negara Gerakan Sosial ini juga memiliki tujuan yang berbeda pula. Perjuangan Gerakan Sosial yang terjadi di Amerika Latin lebih kepada aspek-aspek ekonomi, penegakkan demokrasi serta dipenuhinya hak-hak sipil. Akan tetapi pada awal tahun 90-an pergerakan sosial di Amerika Latin mengalami perkembangan *pertama* tingginya gerakan sosial urban, dan *kedua*, mengedepankan pengembangan ekonomi politik, yang melihat bahwa kebangkitan demokrasi oleh negara, terkait dengan meluasnya jurang pemisah antara kaya dan miskin, yang memiliki kuasa dan tidak.

Di Bolivia sejak tahun 2000-an Gerakan Sosial ditandai dengan adanya kebijakan ekonomi yang berpijak kepada neoliberalisme yang diterapkan oleh presiden sebelum Evo Morales terpilih. Benjamin H. Kohl<sup>31</sup> dalam bukunya menyebutkan Bolivia mengalami perubahan perekonomian dan krisis politik antara akhir tahun 1999 dan tahun 2003. Penerapan kebijakan ekonomi neoliberal membuat rakyat Bolivia menjadi miskin. Penerapan kebijakan di Bolivia sebenarnya berkaitan erat dengan upaya pemerintahan Amerika Serikat yang ingin menjadikan Bolivia sebagai salah satu batu loncatan bagi AS dalam memperluas pengaruh militer di kawasan Amerika Latin ini, Amerika Latin dipilih karena faktor dan posisi perdagangan dimana Amerika Latin menjadi satu-satunya kawasan yang memberikan surplus perdagangan kepada AS yang semakin sulit diberikan oleh Asia dan Eropa, yang berikutnya adalah margin keuntungan yang di atas rata-rata. Kebijakan ekonomi yang berpijak pada neoliberalisme menyebabkan terjadinya Gerakan Sosial yang ditandai dengan aksi protes yang dilakukan oleh rakyat Bolivia juga diwarnai dengan aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Gerakan Sosial yang akhirnya membawa dampak perubahan dalam kehidupan politik dan perekonomian Bolivia adalah gerakan menuntut dikeluarkannya kebijakan nasionalisasi terhadap korporasi asing yang menguasai pengelolaan minyak dan gas.

Dilihat dari gencarnya protes yang dilakukan oleh rakyat Bolivia, serta tuntutan yang diajukan, terlihat jelas bahwa gerakan sosial yang

---

<sup>30</sup> Robert Giplin, *Global Political Economy: Understanding the Intentional Economic Order*, Princeton University Press, New Jersey, 2001, hlm. 337-338.

<sup>31</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-3, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988, hlm.63.

terjadi bukan hanya didasarkan kepada adanya kesamaan nasib yang menimpa mereka, namun terdapat kekuatan-kekuatan yang mengarahkan bagaimana kelompok masyarakat ini bertindak. Dengan kata lain organisasi kemasyarakatan dan elemen politik memiliki peranan.

Dalam perkembangan gerakan sosial di Bolivia Evo Morales dikenal sebagai seorang tokoh gerakan yang aktif dalam menyuarakan berbagai macam ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Bolivia terutama masyarakat pribumi. Ia merupakan salah satu tokoh pribumi Indian yang mendapatkan kesempatan mengenyam karir politik sebagai anggota kongres terpilih Bolivia pada tahun 1997.<sup>32</sup> Ketidakpuasan dan kekecewaan dan ketidakpercayaan yang dialami oleh rakyat Bolivia terhadap kebijakan pemerintahan yang terdahulu, membuat mereka mencari tokoh yang dapat memperjuangkan suara rakyat terutama masyarakat pribumi. Kondisi ini menjadi keuntungan bagi seorang Evo Morales, karena ia selama ini merupakan tokoh yang sering berkecimpung dalam Gerakan Sosial Bolivia dan telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Evo Morales dan Partainya untuk mengajukan diri sebagai kandidat Presiden. Pemilu yang digelar pada 5 Desember 2005 membuktikan kuatnya dukungan terhadap dirinya walaupun mendapatkan persaingan yang ketat dari lawan politiknya Quiseppe.

Setelah terpilih menjadi Presiden Bolivia, Evo Morales menepati janjinya untuk membawa perubahan dan perbaikan politik dan perekonomian Bolivia, dengan mengeluarkan dan menandatangani Dekrit pada 1 Mei 2006 yang menyatakan bahwa semua cadangan gas alam dinasionalisasi: "Negara memperoleh kembali kepemilikan dan juga kontrol secara total dan absolut" terhadap hidrokarbon ( Bolivia memiliki sumber daya alam gas terbesar kedua di Amerika Latin setelah Venezuela, yakni sekitar 48,7 triliun kubik ). Terdapat kesamaan dalam perkembangan Gerakan Sosial yang terjadi di negara-negara Amerika Latin seperti Bolivia, Venezuela, Brazil, Argentina dan lain-lain yaitu tuntutan yang diajukan oleh demonstran, organisasi yang berperan, Ideologi yang dibawa dalam Gerakan Sosial tersebut adalah sosialisme. Hal ini menimbulkan pandangan mengenai bangkitnya sosialisme baru dalam konteks Gerakan Sosial yang tidak berasal dari Gerakan Buruh, namun berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Gerakan ini menentang dominasi kaum elit minoritas pemilik modal yang menguasai sumber-sumber kekayaan negara. Terpilihnya pemimpin ini juga menimbulkan ancaman terhadap hegemoni neoliberalisme yang tidak memperhitungkan dampak yang lebih luas dalam kehidupan sosial.

---

<sup>32</sup> Robert. E. Quirk, dkk., *Poros Setan ( Kisah Empat Presiden Revolusioner: Fidel Castro, M.Ahmadinejad, Evo Morales, Hugo Chaves)*, Penerbit PRISMASOPHIE, Cetakan II, Februari 2007, hlm. 150.



#### **D. Sebab Lain Timbulnya Gerakan Sosial di Bolivia**

Bolivia merupakan wilayah pegunungan yang berbatasan langsung dengan banyak negara amerika latin lainnya. Sebagai sebuah negara pegunungan, hasil-hasil utama dari rakyat Bolivia adalah koka, yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan kokain yang biasa di kelola oleh kartel-kartel perdagangan obat bius dan narkotika di amerika latin. Hal ini memicu peredaran kokain dalam jumlah besar ke wilayah amerika, terutama wilayah perdagangan kokain di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat merasakan adanya ancaman nyata terhadap kehidupan warga negaranya dengan merajalela-nya perdagangan kokain dan obat bius.<sup>33</sup> Oleh sebab itu pemerintah AS mengambil kebijakan untuk mengajak negara-negara Amerika Latin untuk memberantas perdagangan kokain dengan menghancurkan jaringan-jaringa pengedar serta ladang-ladangnya.

Bolivia merupakan salah satu negara yang menjadi target untuk menekan beredarnya perdagangan koka, disebabkan kondisi geographis serta kultur pertanian yang memungkinkan di tanamnya tanaman koka dalam jumlah besar dan legal. Bantuan bantuan keuangan dan militer diberikan oleh AS demi menjalankan misinya memberantas perdagangan kokain, hal ini diterima oleh pemerintahan Bolivia yaitu pada masa Sanchez de Lozada dan Hugo Banzer. Kebijakan yang diambil adalah "zero koka" dibawah Dekrit Presiden no. 26415 yang berisikan pelarangan ekspor koka, pelarangan penjualan koka di pasar sebagai sebuah produk legal, pemusnahan ladang koka. Cara cara yang ditempuh oleh pemerintah Bolivia kebanyakan menggunakan jalan militer dan kekerasan, mereka yang menolak ladangnya di musnahkan akan mendapatkan ancaman bahkan di tembak di tempat dengan alasan mengganggu keamanan negara dibawah sebuah program yang bernama "Dignity Plan".<sup>34</sup>

Tekanan yang di alami oleh petani koka menyebabkan mereka memilih jalan untuk melawan pemerintah dengan cara kekerasan juga, yaitu dengan membentuk tentara-tentara sewaan yang dibayar dari hasil penjualan koka kepada kartel kokain, Evo Morales merupakan salah satu diantaranya. Cara-cara ini di tempuh setelah usaha mereka melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah selalu menemui jalan buntu dan kerap kali di hadang oleh pasukan polisi dan militer yang berujung kepada tindak kekerasan, selain itu mereka yang ladang pertanian kokanya di musnahkan kerap tidak menerima ganti rugi yang layak dari pemerintah.

---

<sup>33</sup> Myles Frechette, Rethinking Latin America: A New Approach In US Foreign Policy, *Howard International Review*; Summer 2006; 28,2; ABI/INFORM Global, hlm. 28.

<sup>34</sup> Peter Nicholls, "Bolivia: Between a rock and a hard palce", *Capital & Class: autumn 2003*; 81; academic research library, hlm. 13-14.

Di bawah naungan Evo Morales jugalah dibentuk organisasi untuk menaungi para petani koka ini, yang kemudian semakin membesar dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Bolivia yang merupakan suku indian asli Bolivia.

Dalam setiap aksinya organisasi ini selalu berhasil mengumpulkan masa dalam jumlah besar, dan kerap kali juga mendapatkan dukungan dari YCOB, sebagai organisasi serikat buruh di Bolivia. Aksi yang merupakan puncak, yang pada akhirnya berhasil menaikkan Evo sebagai Presiden adalah aksi pada tahun 2005. Dalam aksi ini ribuan rakyat Bolivia turun ke jalan untuk menentang dan meminta pertanggung jawaban dari pemerintahan Carlos Mesa dan Eduardo Rodriguez tentang undang-undang Gas dan Perminyakan, aksi ini dikenal sebagai "*Perang Minyak*" (Gas War).

## **E. Simpulan**

Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia merupakan gerakan sosial yang mengandung perjuangan kelas yaitu kelas petani, kaum urban, kaum miskin kota dan desa. Gerakan sosial ditimbulkan bukan hanya adanya kebijakan negara yang di ilhami oleh pemikiran neoliberalis dengan pelaksanaan SAP sebagai produknya, namun juga merupakan sebuah gerakan yang menentang negara terhadap tindakannya yang represif terhadap ranah rakyat. Atau boleh dibilang bahwa pendapat Habermas, Tourine dan Offe adalah benar, dimana kondisi perekonomian negara yang tengah meluruh sebagai akibat perdagangan global dan tekanan organisasi internasional serta negara lain, menyebabkan negara melakukan justifikasi untuk mengintervensi kehidupan sosial rakyat yang juga tengah meluruh dengan dalih tengah melakukan perbaikan kehidupan sosial, dan ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Black, Jan Knipper, *Latin America, Its Problems and Its Promise*, Westview Press, San Farnsisco, 1991.
- Wuryanto, Budhi, dan Wanda Djatmiko, *Evo Morales: Presiden Pemberani Presiden Rakyat*, Penerbit Delokomotif, Cetakan Pertama, Jakarta, Mei 2007.
- Hadi, Syamsul dkk, *Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi Di Indonesia*, Marjin Kiri, Jakarta 2007.
- Kohl, Benjamin H. And Linda C. Farthing, *Impasse In Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*, Zed Books, London-New York, 2006.

- Peet, Richard, *Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO*, Zed book, Malaysia, 2003.
- Putra, Fadillah dkk. *Gerakan Sosial; Konsep, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, penerbit simpul demokrasi, PLaCID's dan Averroes Press, juli 2006.
- Suyatna, Hempri, *Evo Morales; Presiden Bolivia Menantang Arogansi Amerika*, PT Mizan Publika, juni 2007.
- Sach, Jeffrey., *The End of Poverty How We Can Make it Happen in Our Lifetime*, Penguin Books, England 2005.
- Quirk, E. Robert, dkk., *Poros Setan: Kisah Empat Presiden Revolusioner: Fidel Castro - M. Ahamadinejad - Evo Morales - Hugo Chavez*, penterjemah Abdul Qodir Saleh, PRIMASOPHIE, jojakarta, februari 2007.

## Jurnal

- Biglaiser, Glen dan Karl DeRouen Jr., " Economic Reforms and Inflows of Foreign Direct Investment in Latin America", *Latin Amican Resesarch Review*; 2006; 41,1; Academic Research Library.
- Barr, Robert R., "Bolivia: Another Uncompleted Revolution", *Latin American Politics and Society*, Fall 2006; 47,3; Academic Research Library.
- Frechette, Myles, "Rethinking Latin America: A New Approach in US Foreign Policy", *Haroad International Review*, summer 2006; 28,2; ABI/INFORM Global.
- Nicholls, Peter., "Bolivia: Between a rock and a hard place", *Capital & Class*; Autumn 2003; 81; Academic Research Library.

## Webites

- Canel, Eduardo., New Social Movement Theory And Resource Mobilization Theory: The Need for Integration, diperoleh dari <http://www.idre.ca/en/eve-5446-201-1-1-DOtopichtml> , di akses pada 27 Februari 2007, 23.32 wib
- Parkins, Colin, A Post Washington Consensus, diperoleh dari [www.csweb.greennet.org.uk/downloads/parkinspdf](http://www.csweb.greennet.org.uk/downloads/parkinspdf) , di akses pada 11 April 2007, 04.58wib
- Phongpaichit, Pasuk, Theories of Social Movement and Their Relevan for Thailand, di akses pada 8 Maret 2007, 16.52 wib, <http://Pioneer.netserv.cula.ac.th/ppasuk/theoerysocmovt.doc>.

## Kerjasama Indonesia -UNDP Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007

Nur'aini Latifa<sup>1</sup>

### Abstract

*Poverty was one of the problem that become a possession of all the country in the world, however that make one and another country become a different one is amount, motivation, and the efforts of the national government. And we see the same condition in Indonesia as a developing countries. As a developing country Indonesia has faced by the poverty as a head line for every year. Although the government always try to find the best solution for poverty reduction but the civilization can't reach it effectively. After wards in 2006 the government tries to asking UNDP as a partner to find the best solution of poverty reduction. This research will be focused at how the cooperation of government of Indonesia with United Nation Development Program (UNDP) in the effort of solving the poverty Reduction in Indonesia period 2006-2007. we all have to known that it wasn't the first time for this cooperation between Indonesia's government and UNDP. However this year was becomes a renewing cooperation between them. It was sign by the new program of the Government has been made and it was followed by the new program of UNDP. And then they made a deal between their programs to reduced poverty.*

### Latar Belakang

Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan yang berusaha mengkaji mengenai proses pengentasan kemiskinan di Indonesia. Gagasan awal dari kemunculan tulisan ini adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun. Padahal Negara telah mencanangkan banyak program guna mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai cara. Salah satu dari cara-cara tersebut adalah dengan menggandeng UNDP sebagai institusi internasional yang secara khusus menangani pembangunan di negara-negara berkembang.

Krisis finansial yang dimulai tahun 1997 telah meninggalkan jejak yang mendalam bagi perekonomian Indonesia. Meski suatu rezim demokratis telah dimulai tahun 1998, kerangka hukum bagi pembangunan ekonomi lokal masih tetap kompleks. Investasi langsung global (FDI) lebih memilih Cina, India dan Vietnam dari pada Indonesia. Pertumbuhan yang lambat berarti bahwa Indonesia akan menjadi suatu negara dengan angka

---

<sup>1</sup> Alumnus Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Budi Luhur

kemiskinan yang tinggi. Hampir sebagian besar keluarga Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari dua dollar perhari<sup>2</sup>, dan sekitar lima belas persen diklasifikasi sebagai orang miskin. Terdapat kebutuhan yang mendesak akan adanya kebijakan pengentasan kemiskinan yang berpihak pada keluarga dan masyarakat miskin.

## Permasalahan

Program yang dipersembahkan oleh UNDP saat ini tidak hanya bersifat donasi tapi juga bersifat *upgrading* bagi wilayah-wilayah yang digarap oleh pemerintah bersama UNDP, yang menyentuh sampai pada tingkat individu. Salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) sektor sosial dan budaya. Selain itu kesadaran politik dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan menjadi salah satu sasaran utama UNDP dan pemerintah dalam rangka menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan UNDP, mengingat sudah banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah selama bertahun-tahun, pada kenyataannya tidak mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang tengah berlangsung.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah apakah kerjasama Indonesia-UNDP pada tahun 2007 berhasil mengurangi kemiskinan?

## Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan pluralisme<sup>3</sup>, Konsep Kemiskinan<sup>4</sup>, Konsep Pembangunan Modern<sup>5</sup>, Konsep Kesejahteraan Negara<sup>6</sup>, Konsep Millenium Development goals (MDGs)<sup>7</sup>, Teori Organisasi Internasional<sup>8</sup> serta konsep kerja sama<sup>9</sup> sebagai landasan berpikir.

Konsep Kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengertian bahwa Kemiskinan merupakan isu internasional yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia khususnya negara dunia ketiga. Suatu

---

<sup>2</sup> Data UNDP. *Country Programme for Indonesia (2006-2010)*

<sup>3</sup> Viotti dan Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, h. 228-229

<sup>4</sup> Mochtar Mas oed dan Riza Noer Arfani. *Isyu-isyu global masa kini*. Pusat antar universitas- Studi Sosial Universitas Gadjah Mada 1992. Halaman 38

<sup>5</sup> Todaro, Michlle. *Ekonomi pembangunan*. Penerbit Rajawali Press tahun 2007, halaman 22-25

<sup>6</sup> <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf>

<sup>7</sup> *Factsheet LKI Down to Earth No.36 Oktober 2004* <http://dte.gn.apc.org/Aif36.htm>

<sup>8</sup> R. Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, h.363

<sup>9</sup> R. Soeprapto, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997), Ed. Pertama, Cet. Pertama, hlm. 181

isu disebut sebagai isu internasional atau isu global jika suatu jaringan yang terdiri dari penduduk berbagai bagian bumi ini yakin bahwa hal itu memang menjadi isu atau kalau sejumlah besar penduduk di suatu bagian bumi ini yakin bahwa isu itu memang nampak diseluruh muka bumi (Algher)<sup>10</sup>. Dalam dunia internasional kemiskinan dianggap sebagai salah satu nilai penghambat<sup>11</sup> bagi terwujudnya nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh dunia internasional<sup>12</sup>. Hal ini pulalah yang diadopsi oleh Indonesia sebagai negara berpredikat negara berkembang, negara yang menjadikan angka kemiskinan sebagai permasalahan yang paling utama dari tahun ke tahun.

### **Kronologis Kemiskinan di Indonesia**

Mengenai penyebab kemiskinan, tidak ada konsensus global mengenai hal ini: para ahli didalam dan luar Indonesia saling beradu argumentasi. Singkatnya terdapat lima faktor yang bekerja disini, dan seringkali dalam bentuk kombinasi dua atau lebih. Faktor-faktor tersebut adalah, *Pertama* dan paling jelas adalah tidak adanya akses ke pasar kerja. Dengan demikian, salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan menumbuhkan perekonomian. *Kedua*, kemiskinan disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat. *Ketiga*, sebuah keluarga bisa menjadi miskin karena pelayanan sosial yang tidak memadai. Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas masih tidak dapat diakses di beberapa bagian di Indonesia. *Keempat*, Bencana alam alami maupun tidak alami. Kelima, tidak diikutsertakannya masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.<sup>13</sup>

Kelima sebab diatas dapat dijadikan indikasi sebagai penyebab utama terjadinya kemiskinan di Indonesia. Pergantian pemerintahan yang tidak bersifat berkesinambungan, letak geografis Indonesia yang berada pada lempengan aktif gempa vulkanik dan tektonik, dengan potensi bencana alam yang sangat besar. Sejumlah kebijakan pemerintah dan

<sup>10</sup> Mochtar Mas oed dan Riza Noer Arfani. *Isyu-isyu global masa kini*. Pusat antar universitas- Studi Sosial Universitas Gadjah Mada 1992. Halaman 38

<sup>11</sup> Nilai nilai yang dianggap bertentangan dengan kedelapan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh dunia internasional :

a. Kekerasan; b. Sentralisasi wewenang; **c. Kemiskinan**; d. Akumulasi; e. Skala besar; f. Teknologi; g. Negara

<sup>12</sup> Nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh dunia internasional

a. Perdamaian internasional; b. Penentuan nasib sendiri; c. Pembangunan nasional; d. Pemerataan ekonomi internasional; e. Otonomi dan swadaya nasional; f. Keseimbangan ekologis; g. Kebutuhan dasar manusia.; h. Partisipasi

<sup>13</sup> Hans Antlov, Governance Advisor, Local Governance Support Program. *Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat pribadi dan tidak mesti merefleksikan pandangan LGSP atau pun USAID*

program telah dijalankan, triliunan rupiah telah dikucurkan untuk membiayai jalannya program. Hal jenis ini dilakukan sejak dulu, sejak presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, hingga presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada era Soekarno (1945-1965) dikenal Penabede atau biasa disebut Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun. Program pemenuhan kebutuhan pokok rakyat itu pun kandas akibat krisis politik pada 1965. Soeharto, presiden RI kedua (1966-1998), menggulirkan program Inpres Desa Tertinggal, yang diikuti banyak program-program lain, seperti pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

BJ Habibie, presiden ketiga (Mei 1998-Oktober 1999) mengeluarkan Keppres tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai jawaban atas keterpurukan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1997. BJ Habibie membuat Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang diperuntukan bagi masyarakat miskin. Yaitu program pemerintah yang bergerak seputar pelestarian UKM (Usaha Kecil Menengah) dan pengembangan lapangan kerja. Namun ternyata pada pemerintahan selanjutnya program ini mengalami berbagai kendala, salah satunya adalah korupsi besar-besaran yang terjadi pada pemerintahan Gus Dur. Dana JPS habis tanpa sisa dan tidak membuahkan hasil yang optimal. Banyak program-program yang telah dicanangkan berhenti ditengah jalan tanpa tindak lanjut yang berarti dari pemerintah. Hal ini berdampak buruk sampai saat ini pada masyarakat. Akibatnya saat ini SBY diharuskan untuk menanggung berbagai beban yang berkaitan dengan hancurnya program JPS.

SBY diharuskan untuk membangun kembali program-program pemerintah yang hancur akibat korupsi. Namun pada saat itu pemerintah tidak memiliki dana yang cukup karena harus disesuaikan dengan anggaran belanja negara yang sudah sangat minim untuk melakukan subsidi di berbagai daerah, khususnya daerah tertinggal. Melihat dari kegagalan masa lalu, SBY tidak hendak meninggalkan seratus persen program-program pemerintahan sebelumnya. Ia tetap mengadaptasi beberapa program namun melakukan pembaharuan sebagai inovasi pengentasan kemiskinan. Memperbaharui kerja sama dengan UNDP adalah salah satu strategi andalan SBY agar dapat mengentaskan kemiskinan dengan program-program yang bersifat membangun dan berkesinambungan.

## **UNDP dan Kemiskinan di Indonesia**

Bagi UNDP Kemiskinan bersifat multidimensional, melibatkan tidak hanya kurangnya pendapatan, tapi juga buruknya kesehatan, buta huruf, dan kurangnya akses untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, dan

sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kemiskinan juga muncul dimana-mana, dengan adanya 1,2 juta orang diseluruh dunia yang masih hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar per hari dan hampir 850 juta orang kelaparan setiap malam. Pengurangan kemiskinan harus, menjadi pusat perhatian dari upaya pemerintah.

UNDP percaya bahwa pertumbuhan ekonomi penting untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tapi itu saja tidak cukup. Masyarakat miskin harusnya tidak hanya memperoleh keseimbangan/keadilan dari pertumbuhan ekonomi tapi mereka juga harus memiliki kesempatan untuk secara aktif berkontribusi kepada generasinya. Keseimbangan adalah dimensi mayor dari pertumbuhan ekonomi-pengurangan kemiskinan.<sup>14</sup> Menilik dari pandangan UNDP mengenai kemiskinan, ternyata diakui hal ini masih dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan UNDP memang diawali sejak dahulu, namun implementasinya selalu disesuaikan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Setiap kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dengan UNDP selalu berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Pada tahun 2007 UNDP memperbaharui kerja samanya dengan Indonesia, dengan konsep menjunjung tinggi pemberantasan kemiskinan dengan mengedepankan hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Karena itu kedepannya, UNDP akan terus membantu Pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta masyarakat madani dan sektor swasta. Hal ini dilakukan dalam upaya mereka untuk mempromosikan pembangunan manusia di Indonesia agar dapat mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

UNDP Indonesia berupaya untuk memajukan pembangunan manusia, memberantas kemiskinan dan ketidaksetaraan, mengkonsolidasi tata kelola pemerintahan yang demokratis di tingkat nasional maupun daerah, membantu upaya pencegahan dan pemulihan krisis, serta mempromosikan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

### **Kerja Sama Indonesia-UNDP Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan.**

Kemiskinan dalam Hubungan Internasional tergolong dalam isu yang bersifat non-konvensional. Saat ini keberadaanya menjadi isu terpenting di dunia yang harus segera ditemukan solusinya. Solusi yang

---

<sup>14</sup> <http://www.undp.org/poverty/>



dimaksud tidak hanya bersifat jangka pendek namun bersifat berkelanjutan. Keberadaan kemiskinan pada point pertama MDGs menunjukkan identitas kemiskinan yang menjadi masalah utama bagi dunia.

Pemerintah Indonesia dan UNDP berada dalam suatu kesepakatan yang saling menguntungkan (*mutual agreement*) serta tanggungjawab keduanya dalam melaksanakan program negara ini. Program ini juga mendukung realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah 2004-2009. Terlebih lagi, program ini bernilai sangat kooperatif baik bagi Indonesia maupun UNDP, selain itu kedua pihak juga bekerjasama dalam merealisasikan MDG's serta Kesepakatan dalam Konvensi dan Pertemuan PBB (*United Nations Convention and Summit*).

Dibangun berdasarkan pengalaman yang diperoleh dan kemajuan yang diciptakan selama implementasi *Country Cooperation Framework (CCF)* sebelumnya (2001-2005), Memasuki sebuah periode baru dari kerjasama yang erat (2006-2010), dalam kerja sama ini telah disepakati (poin-poin) beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan sebab-sebab kerja sama ini terjadi.<sup>15</sup>

Program UNDP di Indonesia terbagi menjadi 5 bidang; Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG; Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis; Lingkungan yang Berkelanjutan; Pencegahan dan Pemulihan Krisis; dan Pemulihan Aceh dan Sumatera Utara. Program-program tersebut adalah program-program yang mulai dilaksanakan pada tahun 2007. Pada tahun 2007, UNDP Indonesia melaksanakan 37 proyek yang mencakup 28 provinsi dengan total biaya 83,3 juta Dolar AS. Selama tahun tersebut, UNDP membantu pencapaian prestasi-prestasi penting dalam upaya mempromosikan pembangunan manusia di Indonesia, dengan berfokus pada kepemilikan nasional, peningkatan kapasitas serta penyetaraan gender di semua program.

UNDP membantu Indonesia untuk memperkuat kapasitas nasional dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian global terkait lingkungan hidup. Bantuan tersebut dirumuskan melalui perumusan Rencana Aksi Nasional tentang Perubahan Iklim, yang memungkinkan mandat dunia terhadap perubahan iklim dipadukan secara lebih baik ke dalam proses perencanaan di tingkat nasional maupun daerah. Rencana Aksi ini disampaikan dalam sebuah acara paralel yang diadakan oleh UNDP selama Konferensi Bali mengenai Perubahan Iklim pada tahun 2007. UNDP juga membantu meningkatkan kapasitas Pemerintah dan masyarakat dalam kesiapan mereka menghadapi dan mengurangi resiko bencana, dengan memberikan bantuan dalam menyusun RUU Penanggulangan Bencana yang telah

---

<sup>15</sup> <http://www.undp.or.id>

disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI pada bulan Maret 2007. RUU ini merupakan komitmen politik resmi Indonesia dalam memasukkan upaya pengurangan resiko bencana yang dapat menyebabkan kemiskinan.

Di tahun yang sama, dengan bantuan Pemerintah Belanda, Norwegia dan Swedia, UNDP meluncurkan program senilai 10 juta Dolar AS untuk Indonesia guna memajukan akses terhadap keadilan bagi penduduk miskin di Indonesia, melalui Program Pemberdayaan dan LEAD (*Legal Empowerment and Assistance for the Disadvantaged*/Bantuan Hukum bagi Kalangan yang Kurang Beruntung). Kedua program tersebut secara bersamaan berupaya memperkuat bangsa dan akuntabilitas disektor keadilan, dan kapasitas masyarakat untuk memantau dan mengadvokasi hak-hak kaum yang rentan dan marjinal.

Sesuai dengan Deklarasi Roma dan Paris tentang Harmonisasi dan Efektivitas Bantuan, maka Pada tahun 2007, UNDP juga berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra-mitranya di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan yang merupakan hasil dari kerjasama kemitraan antara UNDP dengan mitra-mitra internasional, bilateral maupun nasional Indonesia. Dalam kerja samanya UNDP dan Indonesia memiliki berbagai macam bentuk, hal ini dilakukan dari tingkat nasional hingga kepedulian pada tingkat individu.

Lebih spesifik lagi bentuk kerja sama yang telah terimplementasi antara Indonesia dan UNDP dalam mengentaskan kemiskinan adalah :

- Pemerintah menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang dianjurkan oleh UNDP.<sup>16</sup> Sepuluh tahun terakhir Indonesia menjalani transisi ke sistem pemerintahan demokrasi, yang secara berangsur-angsur mengalami proses konsolidasi. Kebebasan pers telah dibuat dan partai politik diijinkan terbentuk dan bersaing secara bebas dalam proses pemilihan. Pemilihan Umum anggota Dewan dilakukan pada tahun 1999 dan 2004, dan untuk pertama kalinya penduduk Indonesia memilih secara langsung Presidennya pada tahun 2004.

Restrukturisasi dewan legislatif membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk legislatif dua dewan yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia juga telah memulai proses desentralisasi secara luas, dan mengalihkan kekuasaan dan tanggungjawab secara bertahap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah daerah serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

Untuk jelas nya berikut beberapa program Pemerintah dan UNDP guna mendukung terselenggaranya Demokrasi yang merata. Pertama,

---

<sup>16</sup> <http://www.undp.or.id/programme/governance/>

*Parliamentary Reform and Public Engagement Revitalization (PROPER)*<sup>17</sup>. Kedua, *Parliamentary Reform Initiative and DPD Empowerment (PRIDE)*<sup>18</sup>. Ketiga, *Program Governance Reform and DPRD Empowerment (GRADE)*<sup>19</sup>.

- Bentuk kerjasama *Poverty Reduction* melalui *Achievement of the MDGs*. Seperti yang telah diperlihatkan pada bagian sebelumnya, kemajuan Indonesia dalam meraih MDGs mencakup keberhasilan penting di beberapa bidang serta tantangan yang dihadapi di bidang-bidang yang lain. Untuk membantu Indonesia dalam usahanya meraih pencapaian MDG di 2015 mendatang UNDP menyediakan seperangkat pelayanan yang meliputi : a. Bantuan terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; b. Papua Development Programme: *Strengthening Government and Civil Society Capacities to Achieve the MDGs*; c. Advokasi dan pemantauan terhadap kemajuan dalam mencapai MDG's; d. Upaya untuk mendukung pencapaian MDG di wilayah Papua; e. Bentuk dukungan UNDP terhadap proyek Pro-Poor yang dibuat oleh pemerintah.
- Pengelolaan *Environment and Energy* sebagai sumber daya utama, khususnya bagi masyarakat miskin<sup>20</sup>. Keragaman biota laut Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Sumber daya ini harus dikelola dan dijaga dengan baik untuk keuntungan generasi yang akan datang, melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, UNDP membantu pengelolaan berkelanjutan dalam hal lingkungan dan sumber daya alam Indonesia melalui promosi: a. Mempromosikan Pengelolaan lingkungan yang baik; b. Mempromosikan Energi yang berkelanjutan; c. Pengurangan dan adaptasi perubahan iklim; d. Mendukung perlindungan terhadap lapisan ozon.
- *Crisis Prevention and Recovery*<sup>21</sup>. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dilanda bencana. Indonesia juga berpotensi tinggi terhadap gunung meletus dengan 128 gunung api aktif (31 di antaranya dalam pemantauan) dari 600 gunung berapi di seluruh khatulistiwa. Di samping itu, virus flu burung juga telah menelan jumlah korban yang lebih banyak dibandingkan negara lain. Bencana alam mengancam pembangunan manusia di Indonesia dan mengakibatkan rusaknya pencapaian MDG. Konflik sosial juga merupakan tantangan serius terhadap pembangunan. Transisi demokrasi Indonesia dan proses

---

<sup>17</sup> <http://www.undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=61>

<sup>18</sup> <http://www.undp.or.id/factsheets/2008/GOV%20Parliamentary%20Support%20Projects.pdf>

<sup>19</sup> <http://www.undp.or.id/factsheets/2008/GOV%20Parliamentary%20Support%20Projects.pdf>

<sup>20</sup> <http://www.undp.or.id/programme/environment/>

<sup>21</sup> <http://www.undp.or.id/programme/cpr/>

desentralisasi ditandai dengan konflik perselisihan lokal di beberapa provinsi.

UNDP membantu perdamaian dan stabilitas jangka panjang Indonesia melalui upaya pencegahan dan pemulihan krisis yang bertujuan mencegah kejadian konflik dan mengurangi kerentanan terhadap bencana. Pada tahun 2007, program Pencegahan dan Pemulihan Krisis tetap menggambarkan portfolio terbesar UNDP Indonesia, dengan total pengeluaran lebih dari 45 juta Dolar AS, mewakili 54% dari total pengeluaran program UNDP seluruhnya. Bencana alam dan konflik merupakan dua diantaranya adalah penyebab kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat digambarkan dengan banyaknya keluarga yang kehilangan kepala keluarga, harta benda yang dapat menyebabkan kemiskinan. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan UNDP dalam kesepakatan yang telah diperbaharui adalah: a. Pengurangan Resiko Bencana; b. Pencegahan Konflik.

- Perbaikan Aceh and Sumatera Utara. Tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, yang berarti pembangunan disebagian besar wilayah utara harus dimulai dari nol. Disinilah UNDP membantu Indonesia melewati masa-masa transisinya. Bentuk bantuan tersebut disebut juga sistem pendekatan multi-guna, diantaranya adalah: a. Upaya memerangi kemiskinan; b. Memajukan tata kelola pemerintahan yang baik dan akses keadilan; c. Meningkatkan proses perdamaian; d. Mengurangi resiko bencana; e. Memajukan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

## **Simpulan**

Pada tahun 2007, status Indonesia dalam pencapaian MDG menunjukkan kemajuan penting di beberapa bidang, walaupun tetap ditemukan tantangan-tantangan signifikan di bidang-bidang lainnya. Diantaranya adalah :

1. Berbagai prestasi telah tercatat dalam menurunkan angka kematian anak dan bayi di Indonesia. Angka kematian anak dibawah lima tahun turun dari 97 kasus kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi 40 kasus kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 2007. Target untuk mengurangi kematian bayi juga menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu 57 kasus kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 1990 yang berkurang menjadi 32 kasus kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 2007.
2. Prestasi lain juga dicapai pada bidang pendidikan dengan berkurangnya ketimpangan gender, yaitu dengan tercapainya keseimbangan pada jumlah perempuan yang memasuki jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan, serta dengan

meningkatkan tingkat pendaftaran sekolah dasar dan menengah.

3. Indonesia telah berhasil menaikkan peringkatnya hingga ke status negara dengan pendapatan menengah, karena keberhasilannya dalam menaikkan pendapatan perkapita selama beberapa tahun terakhir ini Pemerintah telah menjadi tuan rumah dalam konferensi Perjanjian Kerkangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change, atau UNFCCC) di Bali. Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah RI dan UNDP telah berhasil kan meng-goal kan rencana UNDP dalam menguatkan kapasitas nasional dalam berbagai perjanjian global.
4. Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan RUU penanggulangan bencana. Hal ini diakibatkan oleh adanya kerja sama antara Pemerintah RI dengan UNDP yang membawa inisiatifa baru terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi, yang akan mengakibatkan kemiskinan.

Bentuk-bentuk kerja sama diatas, memberikan hasil yang cukup optimal terhadap tujuan semula pemerintah melakukan kerja sama dengan UNDP. Banyak iklan layanan masyarakat mengenai flu burung dan juga lingkungan di media massa. Bahkan saat ini Indonesia memiliki banyak gerakan yang khusus bergerak untuk mensosialisasikan kehidupan anti kemiskinan. Seperti gerakan masyarakat peduli masyarakat miskin. Didalamnya terdapat rencana-rencana dan juga aksi-aksi yang khusus ditujukan bagi masyarakat miskin yang berasal dari himbauan UNDP yang direlisasikan oleh komunitas tersebut.

Kemiskinan di Indonesia memang perlu waktu yang lama untuk diselesaikan karena itu kerja sama yang dilakukan antara UNDP dan Indonesia perlu diperhatikan dengan seksama bagi semua pihak karena hal ini berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan secara berkala di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNDP dapat dikatakan berhasil karena program-program yang diterapkan melalui program kerja sama ini sebagian besar terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan :

1. Adanya peningkatan pengetahuan bagi penduduk diwilayah pedesaan mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Dibagian Indonesia timur bahkan penduduknya telah memiliki kemampuan yang sangat mendalam mengenai betapa pentingnya hutan bakau. Mereka menanami pesisir pantai hutan bakau tanpa diberi upah.
2. Iklan layanan masyarakat kini mulai memasuki media televisi dan media cetak, padahal hal-hal seperti ini sebelumnya tidak diutamakan bagi pemerintah dan juga masyarakat. Tapi saat ini iklan layanan masyarakat dirasakan sangat penting keberadaanya.
3. Terdapat peningkatan perekonomian daerah setiap tahunnya sebesar 7

% yang sebelumnya sangat fluktuatif.

Selain daripada keberhasilan-keberhasilan tersebut diatas masih banyak lagi keberhasilan lain yang sebagian besar telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya. Perlu diketahui bahwa program kerja sama ini secara tidak langsung juga mengurangi ketergantungan Pemerintah Indonesia terhadap Negara asing. Dapat dikatakan bahwa kerja sama ini membawa manfaat yang sangat besar pada Negara Republik Indonesia.

Bukti-bukti diatas menjadi gambaran betapa kerja sama yang baik antara pemerintah dan UNDP telah membawa dampak yang baik bagi kemakmuran bangsa. Kemiskinan memang bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu atau dua tahun namun kegigihan untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan harus terus dilakukan setiap saat. Karena kemiskinan patut dijadikan sebagai musuh tiap-tiap negara di dunia, dan UNDP salah satu nya mampu menjadi pilar terhadap proses pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

Mas'oed, Mochtar dan Riza Noer Arfani,. *Isyu-isyu global masa kini* . Pusat abtar universitas-Studi Sosial Universitas GADjah Mada 1992.

Newman, W. LAURENCE, *Social Reaserch Methods: Qualitatif and Quantitatif Approaches* (Boston London's? Allin and Bacon, 1997)

Plano, Jack C. dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, (Putra A. Bardin, 1999), alih bahasa Drs. Wawan Juanda.

Soemitro, Prof. Dr. Hj. Sutyastie dan Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia* . Penerbit Rineka Cipta tahun 2000.

Seminar Sehari Pengentasan Kemiskinan dan kesenjangan pemerataan hasil pembangunan. Universitas Moestopo Beragama tahun 1993.

Todaro, Michlle. *Ekonomi pembangunan*. Penerbit Rajawali Press tahun 2007

UNDP. *Recent Economis Developments in Infrastructure- Indonesia Infrastrukture Departement-East Asia And Pacific Region*, Indonesia Averting an infrastructure Crisis: A Framework For Policy And Action

UNDP, *Publication Catalog* July December 2006

UNDP, *Sustaining Indonesia s Forests 2006-2009*

Viotti, Paul R. and Kauppi, Mark V. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, (New York: MacMillan Publishing Company, 1993).

Yayasan Nida Utama, visi, aksi dan solusi. Tiga tahun pemerintahan SBY.,

2008. Yudhoyono, Susilo Bambang dan Harniati, *Pengurangan Kemiskinan di Indoneisa Mengapa tidak cukup dengan memicu perkembangan ekonomi?*, Brighten Press, Bogor 2004 hal 1

### Jurnal

Antlov, Hans, *Governance Advisor, Local Governance Support* laporan UNDP Juni 14, 2006, *Investing For Growth and Recovery Program*.

### Internet

<http://undp.org/energyandenvironment/>

<http://undp.or.id/factsheets/2008/GOV%20Parliamentary%20Support%20Projects.pdf>. Project Facts Indonesia Democratic Governance

<http://undp.or.id/factsheets/2008/GOV%20Parliamentary%20Support%20Projects.pdf>

Parliamentary Reform Initiative and DPD Empowerment (PRIDE)

<http://undp.or.id/programme/governance/>. Decentralization and Local Governance

<http://undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=61>, Parliamentary Support Projects (PROPER, PRIDE GRADE)

<http://undp.or.id/programme/environment/>, Environment and Energy

<http://undp.or.id/programme/povertyreduction/>, Poverty Reduction and Achievement of the MDGs

<http://undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=29>. Building and Reinventing Decentralized Governance

<http://undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=5>. The Indonesian Partnership Fund for HIV/AIDS

<http://undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=6>. To Assess, Reinforce, and Gear Efforts

Towards MDGs

<http://undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=33>. Legal Empowerment and Assistance for the Disadvantaged

<http://undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=34>, Enhancing Communication Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER)

<http://undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=45>. Sustainable and Integrated Management of the Mahakam Delta

<http://undp.or.id/tsunami/>. Aceh and North Sumatra Recovery

<http://undp.or.id/projects/projDetail.asp?ItemID=47>. Global Environmental Facility Small Grants Programme

[http://untreaty.un.org/unts/1\\_60000/5/34/00009694.pdf](http://untreaty.un.org/unts/1_60000/5/34/00009694.pdf). Kesepakatan Awal UNDP Indonesia

[http://untreaty.un.org/unts/1\\_60000/11/11/00020547.pdf](http://untreaty.un.org/unts/1_60000/11/11/00020547.pdf). Diakses pada tanggal 1 Januari 2009. No. 5424 United Nations Special Fund And Indonesia Agreement Concerning Assistance

[http://untreaty.un.org/unts/60001\\_120000/7/28/00013367.pdf](http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/7/28/00013367.pdf). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2008, no. 13188 United Nation Assistance Fund . Signed at Jakarta, on 7 October 196

Dokumen-Dokumen Lain

Data Badan Pusat Statistik

Data UNDP Country Programme for Indonesia (2006-2010)

Diadaptasi dari Baulch dan Hoddinot (1999) ditambah dengan perhitungan SEMERU untuk data Indonesia.

Laporan *The Other half of Climate Change: Why Indonesia must Adapt to protect its Poorest People* dipublikasikan oleh UNDP sebagai masukan dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Bali. Masterplan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bappenas, 2005.



## Peran NGO Dalam Mediasi Konflik Internal : Studi Kasus Peran Crisis Management Initiative (CMI) dalam Mediasi Konflik di Aceh

Ronald Roger Rohrohmana<sup>1</sup>

### Abstract

*The main characteristics of internal conflicts after the Cold War is marked by the increasing number of internal conflicts that in various states around the world and the increase of the quality of weapons used. The term internal conflict or intra-state conflict, which will be widely used in this paper, refers to a dispute or conflict between more than one party that occur within the boundary of a country. Since the significant increase in the number of internal conflicts that occur in the world, Internal conflicts that were previously regarded as an internal or a domestic problem of a state by the international community, is now seen as an important issue that needs to be resolved internationally. The extent of the negative impacts caused by the internal conflicts has brought it into the main spotlight of the international community, particularly in efforts to settle internal conflicts through mediation conducted by the involvement of international non-governmental organizations (NGO).*

*In the context of Indonesia, since the fall of the New Order regime, Indonesia has become the international spotlight due to various internal conflicts that occurring in Indonesia. Among the conflicts is the prolonged conflict in Aceh. This paper will in portray the mediation proses conducted by the Finnish NGO, Crisis Management Initiative (CMI) in mediating a resolution to end the conflict in Aceh between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM). In particular, this paper explore the role played by CMI in brokering peace during the mediation and after the mediation in the peace-building process of Aceh.*

*Keywords: NGO, Mediation, Conflict Resolution, Peacebuilding Process, Multi-Party Approach*

### Pendahuluan

Dalam dua dasawarsa terakhir ini, fenomena konflik internal (intra-state conflict) telah mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun kualitas dari konflik itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, sejak jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia menjadi sorotan internasional akibat berbagai konflik internal yang meningkat secara signifikan. Konflik internal tersebut

---

<sup>1</sup> Staff Lab. HI FISIP Universitas Budi Luhur

berbentuk konflik primordial yang berlandaskan etnis dan agama seperti yang terjadi antara suku Dayak dan Madura kemudian antara kelompok Islam dan Kristen seperti yang terjadi di Maluku dan Poso. Kemudian juga terjadi peningkatan aksi separatisme seperti yang terjadi di Aceh dan Papua di mana tujuan dari gerakan separatisme ini adalah untuk menuntut kemerdekaan dari NKRI.

Dalam hal konflik di Aceh, konflik yang terjadi dengan menggunakan merupakan konflik politik yang diakibatkan oleh konflik sosial yang berkepanjangan atau *protracted social conflict* (PSC) (Rambotham:2008). PSC mengemukakan empat pra-kondisi penyebab konflik di Aceh. Pertama, konflik di Aceh dikaitkan dengan pra-kondisi yang disebut *communal discontent*. Dalam kaitan dengan pra-kondisi ini yang menjadi pemicu konflik adalah hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya. Sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah (khususnya pemerintah orde baru) telah mengancam eksistensi kelompok identitas Aceh sehingga terjadi perlawanan bersenjata dengan pemerintah pusat. Pada tahun 1960-an ketika Pemerintah Pusat mencabut status Propinsi Aceh sebagai Daerah Istimewa dan kemudian melebur Propinsi Aceh menjadi bagian dari wilayah Propinsi Sumatera Utara hal ini menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat Aceh sebab status Propinsi dengan keistimewaan untuk menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan adat istiadat dan hukum syariah bagi masyarakat Aceh bukan hanya merupakan sebuah sumber proteksi secara politik tetapi juga merupakan sumber proteksi bagi nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Aceh.

Pra-kondisi kedua terkait dengan kegagalan Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga terjadi proses "pemiskinan" secara sistematis. Proses penyusutan secara ekonomi telah menyebabkan Aceh menjadi wilayah yang miskin sementara kekuatan ekonomi dan politik yang berada di pulau Jawa (Jakarta) menikmati surplus ekonomi dari hasil eksploitasi sumber daya alam di Aceh. Setelah kemerdekaan Indonesia, kontribusi Aceh terhadap kegiatan pembangunan terus berlanjut karena dukungan sumber daya alamnya yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya sumbangan produk domestik bruto (PDB) yang berasal dari Aceh, terutama yang diperoleh dari sektor minyak dan gas (MIGAS). Semenjak tahun 1975 sumbangan sumber daya alam yang berasal dari Aceh telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 11% dari PDB. Namun dalam kenyataannya dari berbagai hasil sumber daya alam tersebut yang dikembalikan lagi bagi pembangunan daerah Aceh kurang dari 0,5% setiap tahunnya. Keadaan ini

mengakibatkan Aceh tidak dapat membangun daerahnya sendiri dan mengalami ketertinggalan selama hampir 30 tahun.

Pra-kondisi yang ketiga berkaitan dengan karakteristik pemerintahan (governance) yang otoriter. Penekanan pada stabilitas politik dan keamanan secara kaku telah mengabaikan hak sipil dan politik dari masyarakat Aceh sehingga mereka memendam rasa tidak puas dan frustrasi yang mendalam terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat meyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan untuk menindas setiap bentuk protes atau perlawanan. Pra-kondisi Keempat berkaitan dengan *international linkages* yaitu ketika suatu konflik mulai dipengaruhi oleh keberadaan faktor-faktor lain yang berasal dari luar negara di mana konflik internal terjadi. Dalam hal Aceh, dukungan Swedia terhadap eksistensi GAM hingga masuknya senjata dapat dikategorikan dalam pra-kondisi ini.

Pola utama dari strategi penyelesaian konflik Aceh yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejak munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1970-an hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada akhir tahun 1990-an adalah dengan penggunaan aksi represif terhadap anggota dan pemimpin GAM, termasuk yang dicurigai sebagai simpatisan, serta individu-individu maupun kelompok yang membantu GAM. Memasuki tahun 2005, khususnya pasca bencana tsunami yang melanda Aceh muncul kesadaran baru dari pemerintah RI dan pemimpin GAM di Swedia untuk menyelesaikan konflik melalui dialog.

Dalam pandangan *Peacebuilding Process* yang dikemukakan oleh John Galtung, proses pencapaian perdamaian di Aceh dapat dilihat dalam tiga tahap. Tahap yang pertama, proses *peacekeeping* dapat dikesampingkan mengingat intervensi yang menyebabkan de-eskalasi konflik di Aceh tidak berasal dari intervensi militer asing manapun, melainkan bencana tsunami yang menjadi determinan penghentian kekerasan bersenjata (*cessation of hostilities*). Situasi ini oleh William Zartman disebut sebagai *mutually hurting stalemate* dimana pihak-pihak yang bertikai menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan konflik dengan penggunaan kekuatan militer karena akan membawa kerugian yang lebih besar.<sup>2</sup> Tahap yang kedua, proses *peacekeeping*. Proses ini dimulai dari kontak informal antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang dimediasi oleh

---

<sup>2</sup>Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*. (London: Polity Press, 1999), hlm. 162

Crisis Management Initiative. Keberhasilan utama dari proses ini adalah disepakati dan ditandatangani *Memorandum of Understanding* mengenai perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005. Tahap yang ketiga, proses *peacebuilding* yang merupakan kelanjutan dari proses *peacemaking* diawali dengan pembentukan Aceh Monitoring Mission (AMM) sesuai arahan yang ditetapkan dalam MoU Helsinki. AMM yang terdiri dari petugas pemantau dari negara-negara Uni Eropa dan ASEAN diberikan mandat oleh CMI, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka untuk mengawasi pelaksanaan MoU di lapangan.

### **Konflik Internal dan Resolusi Konflik**

Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin terjadi peningkatan terhadap konflik internal yang tersebar luas di berbagai kawasan di seluruh dunia antara lain di Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse menggunakan konsep *contemporary conflict* untuk mengacu secara spesifik pada konflik-konflik yang terjadi setelah Perang Dingin berakhir.<sup>3</sup> Dalam pendefinisian yang berbeda, Luc Van Goor, Kumar Rupesinghe dan Paul Sciarone menyebutkan konflik internal dengan istilah *conflicts in post-colonial states*. Hal ini didasarkan pada fenomena konflik internal yang terjadi di negara-negara bekas jajahan yang terjadi dengan pola yang hampir sama diseluruh dunia. Selanjutnya, M. Kaldor dan Vashee B menggunakan istilah *new war* untuk membedakan dengan *old war* atau pola perang konvensional Clausewitzian di mana perbedaannya dapat dilihat dari tujuan politik, ideologi, bentuk mobilisasi, pembiayaan perang, dukungan eksternal dan bentuk peperangan yang terjadi.<sup>4</sup> Mengingat banyaknya definisi serta ruang lingkup mengenai konflik internal, tulisan ini akan menggunakan istilah konflik internal yang mengacu pada pihak-pihak yang bertikai dalam suatu negara. Definisi ini didasarkan pada definisi konflik internal menurut Michael E. Brown yang menyatakan konflik internal sebagai; "*violent or potentially violent political disputes whose origin can be traced primarily domestic rather than systemic factors, and where armed violence takes place or threaten to take place primarily within borders of a single state.*"<sup>5</sup>

Secara umum, peningkatan fenomena konflik internal yang terjadi di dunia didasarkan pada empat faktor utama yaitu proses pembentukan

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 66

<sup>4</sup>M. Kaldor dan Vashee B. *New Wars: Restructuring the Global Military Sector*. (London: Pinter, 1997), hlm. 7 -19

<sup>5</sup>Michael E. Brown. *Introduction – The International Dimensions of Internal Conflict*. (Massachusetts: MIT Press, 1996), hlm. 1

negara-bangsa, bangkitnya primordialisme dan nasionalisme sempit, faktor sosial-ekonomi, dan dinamika politik global.<sup>6</sup> Barbara Harff dan Ted Robert Gurr dalam bukunya *Ethnic Conflict in World Politics* menyatakan bahwa konflik internal yang terjadi merupakan hasil dari *underlying causes*, seperti perselisihan dan kebencian antar etnis yang sudah ada sebelum masa perang dingin. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (faktor sosial-ekonomi) Luc Van de Goor, Kumar Rupesinghe dan Paul Sciarone dalam bukunya *Between Development and Destruction: an Enquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States* menyatakan bahwa proses pembangunan yang timpang dan diskriminatif oleh penguasa (pemerintah) sebagai salah satu penyebab konflik internal di negara-negara berkembang.

Dalam upaya untuk mengurangi konflik internal maupun dampak dari konflik internal itu sendiri diperlukan upaya penyelesaian konflik untuk mengakhiri pertikaian secara damai sehingga perdamaian yang langgeng dapat tercapai dan krisis kemanusiaan yang lebih besar lagi dapat dihindarkan. Dalam tulisan ini, proses penyelesaian konflik tersebut mengacu pada penggunaan terminologi resolusi konflik yang didefinisikan oleh Peter Wallensteen dalam bukunya *Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and the Global System*. Wallensteen mendefinisikan resolusi konflik sebagai suatu situasi di mana pihak-pihak yang bertikai mencapai kesepakatan untuk mengatasi inti permasalahan yang ada diantara mereka dan menerima kelanjutan eksistensi dari masing-masing pihak serta menghentikan semua aksi kekerasan.<sup>7</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Wallensteen mengandung tiga unsur penting. Pertama, adanya kesepakatan yang dalam prakteknya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi landasan hukum atau bukti nyata bagi semua pihak. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Tanpa adanya pengakuan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain maka proses penyelesaian konflik secara damai tidak dapat terselesaikan. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya (*confidence building measures*) bisa berjalan sebagai landasan dari resolusi konflik menuju perdamaian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Luc Van de Goor, Kumar Rupesinghe dan Paul Sciarone. *Between Development and Destruction: An Enquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States*. (London: Macmillan Press, 1996).

<sup>7</sup>Peter Wallensteen.. *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. (London: Sage Publications, 2002), hlm.8

<sup>8</sup>Ibid., hlm 8-9

Salah satu konsep yang terkait dengan proses atau kerangka kerja resolusi konflik di negara-negara yang mengalami konflik internal adalah konsep *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* yang ditawarkan oleh Johan Galtung. Galtung mendefinisikan *peacekeeping* sebagai proses penghentian atau pengurangan aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Kemudian *peacemaking* didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Selanjutnya, *peacebuilding* diartikan sebagai proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian dalam artian positive peace di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik internal, khususnya masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif.<sup>9</sup> Penggunaan pendekatan multi-jalur (*multi-track approach*)<sup>10</sup> dalam proses resolusi konflik juga berguna dalam membantu meningkatkan fleksibilitas dan pengaruh pihak yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik internal.

### **Peran CMI dalam Mediasi Resolusi Konflik Aceh**

Bersamaan juga dengan terjadinya peningkatan konflik internal di Indonesia, terjadi juga perubahan dari upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah dari jalur militer ke jalur dialog yang ditengahi oleh organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dalam upaya menengahi konflik Aceh, kemudian upaya perorangan sebagaimana yang dilakukan Jusuf Kalla dalam resolusi konflik di Poso dan keterlibatan NGO seperti Henri Dunant Centre dan *Crisis Management Initiative*. Dalam hal resolusi konflik di Aceh keterlibatan NGO sangat menentukan pencapaian kesepakatan damai yang tercapai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka serta menjadi dasar bagi terciptanya perdamaian yang langgeng (*sustainable peace*). Keberhasilan Crisis Management Initiative dalam memediasi penyelesaian konflik secara damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan bukti bahwa peranan mediasi internasional yang dilakukan

---

<sup>9</sup>Johan Galtung. *Three Approaches to peace: peacekeeping, peacemaking and peacebuilding*. (Copenhagen: Christian Eljers, 1975). dikutip dari Aleksius Jemadu. "Analisis Konflik Internal dan Perspektif Ilmu Hubungan Internasional", dalam Yulius P. Hermawan (eds).. *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.93

<sup>10</sup>Multi-Track Approach berasal dari pendekatan Multi-Track Diplomacy yang pertama kali dikemukakan oleh Joseph Montville pada tahun 1981 untuk membedakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh negara (jalur pertama) dan non-pemerintah (jalur kedua) dalam proses resolusi konflik.

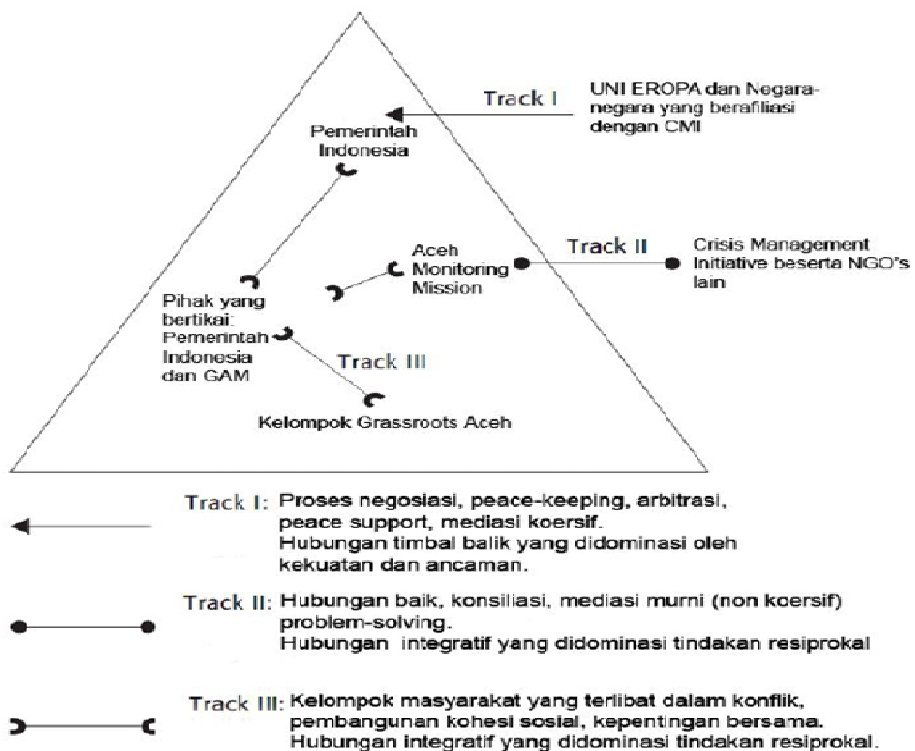
oleh non-governmental organization (NGO) dibutuhkan dalam resolusi konflik.

Melihat dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, keberadaan NGO sebagai mediator dapat terjadi karena adanya *political will* dari pihak-pihak yang bertikai untuk melibatkan pihak lain (pihak ketiga) sebagai mediator dalam konflik. Dalam hal resolusi konflik Aceh, adanya *political will* dari pemerintah Indonesia dan GAM memungkinkan CMI untuk berperan sebagai *problem solver* (pemecah masalah) bagi kedua belah pihak. Hal kedua yang membuat NGO dapat diterima sebagai mediator konflik adalah keberadaan NGO sebagai suatu forum mediasi dan bukan arbitrase dalam suatu konflik. Dalam hal ini, sebelum CMI menjadi mediator dalam konflik Aceh, Pemerintah Indonesia menginginkan agar penyelesaian konflik Aceh dilakukan melalui perundingan yang difasilitasi oleh ASEAN. Permintaan ini ditolak oleh GAM atas dasar netralitas negara-negara ASEAN yang secara tradisional mendukung posisi Indonesia dalam konflik Aceh.<sup>11</sup> Di pihak lain, pimpinan GAM menghendaki agar Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi mediator penyelesaian konflik di Aceh. Namun, dengan melihat pengalaman yang pernah ditempuh Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah Timor Timur melalui mediasi PBB, maka kekhawatiran bahwa konflik Aceh akan di-internasionalisasi-kann membuat Pemerintah Indonesia untuk menolak usulan tersebut. Setelah terjadinya *deadlock* dalam pemilihan forum, Pemerintah Indonesia dan GAM mulai membuka dialog dibawah mediasi Henry Dunant Center (2002) dan kemudian Crisis Management Initiative (2004). Hal yang ketiga yang memungkinkan NGO berperan sebagai mediator konflik adalah integritas NGO sebagai mediator sehingga dianggap kredibel dan dapat dipercaya oleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini, CMI merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang diketuai oleh Presiden Marthi Athisaari (mantan Presiden Finlandia). Luasnya akses dan pengaruh yang dimiliki dengan Uni Eropa membuat CMI membatasi perannya sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik di Aceh. Melalui pembatasan peran ini, CMI dapat tetap menjaga kualitas, imparialitas serta transparansinya sehingga dapat menjadi pihak yang kredibel dan dipercaya oleh Pemerintah Indonesia dan GAM. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan kontribusi dari mediasi yang dilakukan oleh Crisis Management Initiative.

---

<sup>11</sup> Dukungan ini disebabkan oleh prinsip *non-interference* dalam permasalahan internal masing-masing negara anggota ASEAN yang menandatangani dan meratifikasi *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC).

Pendekatan *Multi-Party* (table 1) yang digunakan oleh CMI juga menjadi factor lain keberhasilan dalam mediasi resolusi konflik di Aceh. Pendekatan multi-party memungkinkan CMI untuk membuka dialog dengan berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung dalam konflik maupun dalam proses *peacebuilding*. Sebagai sebuah NGO tentunya CMI memiliki berbagai keterbatasan, namun lewat penggunaan pendekatan ini pengaruh mediasi CMI dalam memprakarsai perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Aceh dapat ditingkatkan. Dukungan yang diberikan kepada CMI oleh Uni Eropa menjadi salah satu pengaruh besar terhadap kekuatan mediasi yang dimiliki CMI. Sifat integratif yang dimiliki oleh pendekatan ini menyatukan setiap pihak yang terlibat dalam konflik sehingga pembagian beban dan resiko dalam melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam Deklarasi MoU Helsinki ditanggung bersama-sama.



### Pembentukan Aceh Monitoring Mission sebagai Kelanjutan Mediasi CMI

Dalam proses dialog yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Hamid Awaludin, Mantan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Gerakan Aceh Merdeka yang diwakili oleh Malik Mahmud, CMI berupaya untuk mencari sebuah solusi yang menyeluruh dan



permanen dalam mengakhiri konflik di Aceh. Isu-isu yang dibicarakan selama negosiasi berlangsung meliputi topik seperti pengelolaan pemerintahan sendiri di Aceh (*self-governance*), partisipasi politik masyarakat Aceh, hubungan ekonomi, pemberian pengampunan atau amnesty kepada kombatan GAM, penegakan HAM dan keadilan di Aceh serta penanggulangan keamanan dan partisipasi pengamat asing dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh (*peacebuilding process*). Komitmen kedua pihak berdasarkan kesepakatan atas kompromi topik-topik yang di atas kemudian diformalkan dalam sebuah Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh perwakilan kedua pihak pada bulan Agustus 2005. Kesepakatan ini kemudian diikuti dengan pembentukan *Aceh Monitoring Mission* yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan MoU. Pembentukan *Aceh Monitoring Mission* (AMM) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan MoU Helsinki dibawah mediasi CMI sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5.1. MoU;

*“Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN58 yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.”*

Tugas *Aceh Monitoring Mission* sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5.2. MoU adalah;

*“Tugas AMM adalah untuk:*

- a. *Memantau demobilisasi GAM dan decommissioning persenjataannya.*
- b. *Memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.*
- c. *Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.*
- d. *Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.*
- e. *Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.*
- f. *Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.*
- g. *Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.*
- h. *Membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.”*

Kehadiran AMM di Aceh berawal dari pembentukan misi pemantau awal atau *Initial Monitoring Presence* (IMP) yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2005 dan terdiri dari 80 personel yang tersebar di 5 lokasi di Aceh. IMP dibentuk dalam waktu 12 hari dengan tujuan

menghindari kekosongan kekuasaan yang mungkin muncul sebelum AMM secara resmi terbentuk pada tanggal 16 September 2005.

AMM merupakan sebuah misi sipil dibawah kerangka kerja *European Security and Defence Policy* dan dibiayai oleh negara-negara anggota Uni Eropa.<sup>12</sup> Sejak awalnya, AMM mengalami dua tantangan besar dalam menjalankan perannya di Aceh. Pertama, singkatnya waktu untuk mempersiapkan pembentukan misi serta lamanya proses pendanaan di Brussels menjadi tantangan besar bagi pembentukan AMM. Ketika CMI meminta agar Uni Eropa bersedia mendanai pembentukan AMM, terdapat berbagai reaksi terhadap permintaan itu. *The General Affairs and External Relations Council* (GAERC) menanggapi dengan positif namun hati-hati terhadap pembentukan misi yang dipimpin Uni Eropa di Aceh. Tanggapan yang berlawanan muncul dari *The Political and Security Committee* (PSC). Bahkan keadaan ini diperparah dengan tidak adanya konsensus diantara negara-negara Uni Eropa. Diantara negara-negara Uni Eropa, hanya Finlandia, Swedia, Belanda, Perancis dan Inggris yang mendukung pendanaan AMM oleh Uni Eropa sedangkan negara-negara Uni Eropa lainnya beranggapan bahwa Uni Eropa perlu lebih fokus pada daerah-daerah dimana aktifitas Uni Eropa sudah ada, seperti di wilayah Balkan dan Eropa.<sup>13</sup>

Perdebatan mengenai pendanaan AMM baru dapat diputuskan ketika Javier Solana, ketika itu menjabat sebagai Sekjen Uni Eropa, melakukan intervensi yang mempengaruhi anggota dewan Uni Eropa lainnya untuk menyepakati pendanaan AMM melalui *Common Foreign and Security Policy* (CFSP). Anggaran yang diperlukan untuk pendanaan AMM adalah sebesar EUR 15 juta, sedangkan CFSP hanya dapat memberikan dana sebesar EUR 9 juta. Sisa dana kemudian diperoleh dari kontribusi tujuh negara anggota Uni Eropa. Akan tetapi dari semua negara Uni Eropa yang terlibat dalam pendanaan serta pembentukan AMM di Aceh, Inggris yang pada tahun 2005 menduduki kursi kepresidenan Uni Eropa, melalui kedutaan besarnya di Jakarta menanggung beban administrasi dan operasional selama proses pencairan dana dan operasional IMP dan AMM.<sup>14</sup>

Tantangan yang kedua berhubungan penugasan 125 orang dari Uni Eropa adalah pemberian pelatihan sebagai petugas pengawas implementasi proses perdamaian di Aceh. Para petugas menjalani sesi pendidikan dan pelatihan "kilat" selama tiga hari dimana dalam sesi tersebut mereka diperlengkapi dengan materi singkat mengenai budaya,

---

<sup>12</sup> Kirsten E. Schulze. *Mission Not So Impossible: The Aceh Monitoring Mission and Lessons Learned for the EU*. (Jerman: Friedrich Ebert Stiftung, 2007), hlm. 4

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>14</sup> *Ibid.*

masyarakat, sejarah dan konflik Aceh, serta tata cara kerja TNI. Terdapat juga pelatihan mengenai kesiagaan bencana serta operasi kemanusiaan. Pelatihan khusus diberikan hanya kepada empat tim yang ditugasi sebagai petugas penerima dan penghancur senjata yang diserahkan oleh GAM. Tim ini diberikan pelatihan mengenai cara-cara berkomunikasi dengan mantan pejuang GAM saat penyerahan senjata supaya tidak terkesan menghina mereka dan juga cara menggunakan mesin pemotong besi untuk menghancurkan senjata yang diserahkan.<sup>15</sup>

Selain pelatihan, pemahaman Bahasa Indonesia menjadi tantangan besar karena hanya sedikit petugas pengawas AMM yang mengerti bahasa Indonesia. Kurangnya penterjemah juga menjadi kendala dalam berkomunikasi. Bahkan di beberapa daerah di Aceh, penggunaan bahasa Aceh dengan dialek-dialek yang berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas AMM untuk berkomunikasi dengan masyarakat Aceh. Permasalahan ini kemudian diperparah dengan kehadiran sejumlah kecil petugas AMM yang tidak menguasai bahasa Inggris.

Pada akhirnya kehadiran AMM di Aceh merupakan sebuah kesuksesan besar terhadap proses perdamaian di Aceh. Kunci dari keberhasilan AMM adalah komunikasi intensif yang dilakukan oleh Ketua AMM, Pieter Feith bersama petinggi GAM dan pejabat pemerintah, TNI dan Polri dalam pertemuan mingguan *Commission on Security Arrangements* (COSA). Pada tingkat district atau kecamatan pertemuan ini dinamakan *District Commission on Security Arrangements* (DiCOSA). Forum ini bertujuan untuk mengkomunikasikan segala isu, pertanyaan, dan keluhan antar kedua pihak supaya tidak menjadi hambatan dalam proses perdamaian secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugas sesuai pasal 5.2. MoU Helsinki, AMM mengawasi pelepasan dan pemberian amnesti kepada 1.600 tahanan GAM oleh Pemerintah Indonesia. Pemberian amnesti merupakan bentuk *confidence build measure* untuk mengharmonisasikan keadaan. Dalam hal penghancuran senjata GAM, AMM mengawasi penyerahan dan penghancuran 840 pucuk senjata. Penghancuran persenjataan GAM dilakukan dalam empat tahap yang berakhir pada bulan Desember 2005. Bagi pemerintah Indonesia, penyerahan dan penghancuran persenjataan GAM merupakan indikator keseriusan GAM dalam implementasi proses perdamaian Aceh. Keberlangsungan proses perdamaian juga bergantung pada tahap ini. 66 Sejalan dengan penyerahan dan penghancuran persenjataan GAM, AMM mengawasi penarikan pasukan non-organik TNI

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

dan Polri keluar dari Aceh. Proses penarikan pasukan berlangsung parallel dengan proses penghancuran persenjataan GAM yang dimulai pada bulan September - Desember 2005. Pada akhir tahun 2005, 25.890 pasukan TNI dan 5.791 pasukan Brimob telah ditarik keluar dari Aceh.

AMM juga melakukan pengawasan terhadap proses reintegrasi mantan pejuang GAM, termasuk mantan tahanan GAM yang telah diberi amnesti kedalam masyarakat. Sesuai dengan Pasal 5.2. MoU Helsinki, AMM hanya bertugas untuk mengawasi proses ini, sedangkan pelaksanaan dari proses reintegrasi ini ditangani oleh NGO internasional bersama dengan pemerintah daerah Aceh dan Badan Reintegrasi Damai Aceh yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Proses reintegrasi ini dilakukan dengan memberikan dana bantuan sebesar Rp. 1 juta per orang dari daftar sebanyak 3.000 mantan pejuang. Dalam hal ini AMM melihat terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian dana bantuan yang dilakukan oleh para pemimpin lokal GAM ditingkat distrik. Selain penyimpangan, proses reintegrasi dinilai gagal karena hanya mengakui eksistensi mantan pejuang GAM, sedangkan mantan anggota *perlawanan rakyat* yang merupakan kelompok yang terdiri dari masyarakat Aceh binaan TNI yang difungsikan sebagai operator intelijen di lapangan tidak diakui.

Dalam mengawal transisi politik di Aceh, AMM bertugas dalam mengawasi tiga hal, yaitu penegakan HAM, pembentukan perundangundangan pemerintahan Aceh, dan pemilihan umum di Aceh. Dalam penegakan HAM, AMM memiliki dua tugas utama yaitu mengawasi pelanggaran HAM yang terjadi setelah tanggal 15 Agustus 2005 dan memonitor pembentukan pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Peran yang dimainkan AMM dalam proses ini bukanlah suatu peran yang mudah sebab AMM selaku pengawas harus tetap menjaga ketidakberpihakannya dan yang terpenting tidak menjadi advokat HAM sebagaimana banyak NGO asing pada waktu itu bersikap terhadap Indonesia. Isu pelanggaran HAM selalu menjadi "kartu AS" negara-negara barat dan NGO-NGO kemanusiaan untuk memojokkan Pemerintah Indonesia sehingga jika AMM melenceng dari perannya, seluruh proses perdamaian Aceh bisa berakhir dengan sia-sia.

Pada bulan Desember 2010, *Aceh Monitoring Mission* menyelesaikan misinya sebagai pengawas pelaksanaan MoU Helsinki di Aceh. Keberadaan AMM di Aceh pasca penandatanganan MoU merupakan kontribusi besar terhadap *Peace-Building Process* di Aceh.

## Kesimpulan

Keberhasilan Crisis Management Initiative dalam mediasi resolusi konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM telah menjadikan peranan mediasi NGO sebagai sorotan utama dalam studi perdamaian dan konflik. Dalam hal ini, pendekatan *multi-party* dalam mediasi resolusi konflik yang digunakan CMI memungkinkan terlibatnya aktor internasional dari berbagai jalur baik pemerintah maupun non-pemerintah, seperti Uni Eropa dan NGO lainnya dalam proses peacemaking dan peacebuilding di Aceh. Dengan tetap berpegang pada perannya sebagai fasilitator dan mediator konflik sekalipun memiliki leverage yang tinggi untuk mengangkat isu-isu seperti penegakan pelanggaran HAM di Aceh, CMI dapat memperoleh kepercayaan Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dan menjaga keberlangsungan proses perdamaian. Selain peran CMI, *political will* yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dan GAM untuk berdialog dibawah mediasi CMI merupakan faktor kunci tercapainya perdamaian lewat kesepakatan MoU Helsinki dan keberlangsungan *peacebuilding process* di Aceh guna menciptakan perdamaian yang langgeng.

## Daftar Pustaka

- Azar, E. (2002). *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Dalam H. Miall, O. Ramsbotham, & T. Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution* (hal. 85). London: MacMillan.
- Brown, M. E. (1996). *Introduction - The International Dimension of Internal Conflicts*. Massachusetts: MIT Press.
- A. Jemadu, & Y. P. Hermawan (Penyunt.), *Analisis Konflik Internal dari Perspektif Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Goor, L. V., Rupesinghe, K., & Sciarone, P. (1996). *Between Development and Destruction: An Enquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States*. London: Macmillan Press.
- Hugh Miall, O. R. (1999). *Contemporary Conflict Resolution*. Londong: Polity Press.
- Nazar, M. (2008). *Sejarah Konflik Aceh: Perspektif Pemerintah Aceh*. Jakarta: LIPI.
- Schulze, K. E. (2007). *Mission Not So Impossible: The Aceh Monitoring Mission and Lessons Learned for the EU*. Jerman: Friedrich Ebert Stiftung.

## Cendekiawan dan Demokrasi

Iwan Gunawan\*

### *Abstract*

*Democracy, as voiced by its scholars, is a system that has few vices. The fall of the authoritarian New Order regime is changing conditions in the form of a deprivation of liberty (freedom from). The task of the scholars in the reform era is now complete freedom to build (freedom for) social ideals. Unfortunately, the political function of intellectuals increasingly marginalized, until now dominated the political scene who want permanence medioker-oligarchic domination of the legislature. Application of the principle of meritocracy in politics the more necessary, for policy to be more objective so as to provide welfare for the people.*

**Keyword:** scholar, democracy, politics

### **Pendahuluan**

Relasi cendekiawan dan politik kini, menarik untuk diamati. Tidak sedikit pandangan yang menyiratkan bahwa carut-marutnya kondisi politik ekonomi dewasa ini diakibatkan dari terjadinya krisis dukungan publik terhadap cendekiawan. Dan pada saat bersamaan panggung politik kini tengah didominasi kaum medioker.<sup>1</sup>

Pandangan yang mengemuka itu, sekurangnya telah memberikan gambaran ironis dilihat dari karakter cendekiawan sebagai agen perubahan. Gambaran ironis itu diantaranya adalah :

*Pertama*, gagasan atau ideologi yang menjadi kekuatan dan daya pikat dari cendekiawan tidak lagi jadi tumpuan untuk memenangkan kompetisi meraih kursi parlemen di era yang kini demokratis. Dimana kapital tengah menggantikan gagasan dalam bargaining kursi kekuasaan<sup>2</sup>.

---

\* Tenaga ahli di Dirjen PMD Kemendagri; Anggota Presidium Pengurus Pusat MASIKA (Majelis Sinergi Kalam) – ICMI; Dosen FISIP Universitas Jakarta.

<sup>1</sup> Arti medioker : Dikenal pada era Prancis Pertengahan, asal kata Latin *mediocris*, dalam Inggris diartikan moderate of low quality, ability, atau performance (sumber: m-w.com). Di media cetak pernah digunakan Rocky Gerung. Gerung menggunakan *mediocre* untuk menyebut performance atau citra elit politik Indonesia sekarang.

<sup>2</sup> Ignas Kleden berpandangan bahwa Indonesia dewasa ini sedang menghadapi masalah demokrasi yang sangat konkret, yaitu oligarki para pemilik modal.. Ignas melihat bahwa, risiko munculnya oligarki pemilik modal dalam politik, sepenuhnya terjadi karena politik uang. Dimana oligarki pemilik modal dalam era reformasi sekarang ini menjadi pengganti oligarki orang-orang ahli ketika rezim Soeharto. Dalam kedua bentuk oligarki itu, yang berkuasa bukan rakyat, tapi hanya segelintir orang. Mereka adalah para pemilik modal dalam era reformasi dan para teknokrat ketika Orde Baru. Selanjutnya Ignas menambahkan bahwa keadaan saat ini bahkan lebih parah dibandingkan zaman Orde Baru. Yang terjadi

*Kedua*, seorang cendekiawan dalam realitasnya dipandang tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam menyatakan kebenaran yang menjadi fungsi politiknya. Para cendekiawan lebih menekankan kelanggengan hubungan dengan partai-partai daripada memberikan kritik untuk menciptakan perubahan yang berarti. Dimana partai politik menjadi penentu gagasan yang disuarakan seorang cendekiawan.

*Ketiga*, peminggiran posisi cendekiawan dari panggung politik ini, menyeret kepada timbulnya pandangan dimana keterlibatan cendekiawan dalam politik sebagai sebuah keterlibatan dalam konspirasi yang bermakna kotor dan penghianatan.

*Keempat*, menyusutnya kaum cendekiawan dalam kehidupan politik berdampak pada bentuk suatu persaingan politik yang semakin tidak rasional dan obyektif. Sikap oposisi dan koalisi dalam politik tidak lagi berdasar pada gagasan politik yang menjadi tujuan mulia sebuah partai, akan tetapi lebih mengedepankan tawar menawar kursi dan jabatan.

Pada hal lain, justru kejujuran dalam memperjuangkan gagasan politik yang dicita-citakan merupakan karakter yang menjadi ciri dari kecendekiawanan. Selain dari kearifan sebagai orang yang memiliki kedalaman ilmu, wawasan yang luas dan visi ke depan.

Cendekiawan dan para pendukungnya bersama-sama memperjuangkan bagaimana sebuah gagasan diwujudkan, yaitu cita-cita perubahan dari kondisi tertindas menjadi sebuah bangsa yang bebas, adil dan bermartabat. Dalam konteks ini, ironisme relasi cendekiawan dan politik dari pandangan yang mengemuka itu menimbulkan tanda tanya, masih adakah cendekiawan di negeri ini ?

### **Figur Cendekiawan**

Secara historis, keterlibatan dalam partai politik bagi cendekiawan di Indonesia bukanlah pilihan yang dianggap kotor dan bentuk penghianatan. Professor Husseyn Alatas seorang sosiolog dari Malaysia mengungkapkan bahwa Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Syafrudin Prawiranegara adalah para cendekiawan yang berada di garis terdepan

---

sekarang adalah menyusutnya partisipasi masyarakat disertai rendahnya tingkat rasionalitas politik karena dikacaukan oleh uang. Sementara ketika rezim Soeharto, orang-orang ahli naik menduduki jabatan politik tanpa legitimasi dari masyarakat. Yang terjadi adalah partisipasi masyarakat terabaikan, namun kebijakan-kebijakannya dengan tingkat rasionalitas politik yang sangat tinggi. *Ignas Kleden: Gejala Apatisme Politik Menguat, dalam kompas 11 Desember 2003.*--- Penulis berpandangan bahwa gejala yang disekemukakan oleh Ignas tersebut justru di tahun 2008 ini semakin menguat ---

dari masing-masing partai politiknya dalam memperjuangkan ideologi<sup>3</sup>. Keunggulan gagasan mereka, meskipun kini bisa jadi tidak relevan, masih diminati sebagai sumber kajian dan menjadi inspirasi dalam upaya mewujudkan sebuah bangsa demokratis dan sejahtera.

Tentu saja, bukan hanya keunggulan dari gagasannya saja sehingga seorang cendekiawan menjadi pemimpin, akan tetapi juga adalah keberaniannya untuk melawan penindasan. Integritas mereka dalam mewujudkan gagasan keadilan sosial yang dianutnya menjadi teladan<sup>4</sup> publik dan didukung dengan sukarela. Pendek kata, relasi cendekiawan dan politik bukan relasi yang terpisah, berbeda dan berlawanan. Melainkan, karena strategisnya kursi parlemen maka para cendekiawan itu berupaya dengan segala kreasinya untuk meraihnya.

Orde baru sebagai rezim repressif-otoriter yang membatasi kebebasan, bukan alasan yang kuat bagi para cendekiawan untuk membatasi diri dalam memperjuangkan misi gagasannya. Parlemen dikebiri menjadi sub-ordinat dari kekuasaan rezim. Pemilu sebagai ciri dari negara demokratis hanya dilaksanakan kulit luarnya saja. Betapapun parlemen terkooptasi, tidak mengurangi anggapan kaum cendekiawan akan pentingnya untuk meraih kursi di lembaga legislatif ini. Tidak kurang cendekiawan seperti Cak Nur<sup>5</sup> (HMI) dan Gus Dur (NU) yang mendapat julukan "Guru Bangsa" di jaman orde baru pernah menjadi anggota parlemen.

Meskipun keterkaitan cendekiawan dan parlemen di Indonesia sangat erat, namun demikian, sejarah menuliskan bahwa parlemen bukan jalan satu-satunya untuk menciptakan perubahan. Amien Rais melalui organisasi Muhammadiyah yang dipimpinnya menyuarakan pentingnya

---

<sup>3</sup> Syed Hussein Alatas dalam bukunya yang berjudul *Kita dengan Islam : Tumbuh Tidak Berbuah* (1979), majalah *UMMAT*, No 6, Thn II, 16 September 1006. hal 34.

<sup>4</sup> Keteladanan dalam berdemokrasi menjadi sangat penting di dalam kehidupan demokrasi. Dimana pemilihan yang diselenggarakan secara demokratis tidak secara otomatis menjamin terpilihnya pemimpin yang menjamin kelanggengan demokrasi. Karenanya, selain perlu memperhatikan struktur atau lembaga-lembaga politik dalam suatu negara untuk pengembangan kehidupan politik yang demokratis, perlu memperhatikan pula aspek personalitas. Empat prinsip yang perlu diaktualisasikan oleh seorang pemimpin yang demokrat, yaitu, (1) menjadi pendengar aktif, yang mencerminkan sikap dan pikiran yang terbuka; (2) reframing, sikap menghidari dari kecenderungan untuk menggunakan kerangka dasar sendiri dalam menilai perilaku orang lain; (3) menghindari dari bahasa aku dan kamu yang berlebihan, suatu sikap yang bertentangan dengan karakter demokratis. (4) jauh dari sikap stereotype yang mengabaikan fakta bahwa manusia bebas untuk menentukan pilihan sikapnya; "*Kekerasan dan Pelembagaan Demokrasi*," *FLAMMA* Edisi 2/Tahun 2/Maret 1998.

<sup>5</sup> Karier Cak Nur di parlemen : Anggota MPR-RI 1987-1992 dan 1992-1997, Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, 2001.



rezim Soeharto mundur. Melalui jalur ekstra parlemen ia tanpa lelah menggaungkan kritik terbuka terhadap otoriterisme rezim. Hingga kemudian momentum reformasi tiba diiringi dengan mundurnya Soeharto. Rupanya Amien Rais harus melakukan "Ijtihad Politik" untuk membangun sebuah partai demi mewujudkan agenda reformasi.

Dalam era reformasi, ketiga figur cendekiawan Cak Nur, Gus Dur dan Amien Rais itu telah menjadi tokoh yang menjadi ikon dalam proses perjuangan meletakkan pondasi baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Amien Rais kemudian menjabat Ketua MPR, Gus Dur terpilih menjadi Presiden dan Cak Nur sebagai tokoh independent menyerukan pentingnya oposisi-loyal. Tidak hanya demikian, Amien Rais dan Cak Nur ikut berkompetisi untuk memenangkan kursi kepresidenan. Meski Cak Nur gagal dalam tahap pencalonan, dan Amien kalah dalam pemilihan.

Tentu saja, sebagai manusia mereka tidak sempurna. Namun dilihat dari perannya dalam meningkatkan kualitas parlemen untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang ideal, saham mereka sangat berarti. Kekritisan mereka sebagai seorang cendekiawan tidak berkurang karena posisinya sebagai anggota parlemen. Dan juga peran mereka dalam dunia politik tidak pernah terhenti meskipun di luar partai. Dalam posisi apapun mereka dengan otensitas yang dimilikinya, sebagaimana diakui publik, adalah manusia yang menjalankan fungsi kecendekiawanan.

## Tantangan Demokrasi

Demokrasi sebagaimana disuarakan para cendekiawan, adalah sebuah sistem yang memiliki sedikit keburukan daripada sistem lainnya. Meskipun demikian, demokrasi bukanlah barang jadi. Tumbangnyanya sebuah rezim otoriter hanyalah perubahan kondisi dalam bentuk kebebasan dari sebuah pemasangan (*freedom from*). Tugas para cendekiawan dalam era reformasi kini adalah mengisi kebebasan untuk membangun (*freedom for*) cita-cita sosialnya<sup>6</sup>.

Mewujudkan keadilan sosial dalam era paska kejatuhan rezim otoriter tidaklah semudah bagaimana membalik telapak tangan. Demokrasi yang dihasilkan melalui reformasi telah memberikan ruang bagi tersalurkannya berbagai gagasan bagaimana keadilan sosial bangsa ini

---

<sup>6</sup> Demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit. Banyak ketegangan dan pertentangan, dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban; sebuah pemerintahan mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini.. *A March of Liberty : A Constitutional History of the United States*; Melvin I.Urofsky (2nd ed, 2001).

dicapai. Namun, pada sisi lain kebijakan yang ditetapkan masih sangat kurang memberikan hasil yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan jamannya. Sedikit kegagalan dari sistem demokrasi memang merupakan kenyataan yang tak bisa dihindarkan. Namun, kegagalan yang melampaui kesuksesan akibat dari kebijakan yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa aspirasi kebangsaan dari publik dewasa ini belum terserap menjadi *rule of the game* dalam berdemokrasi. Untuk mencapai kesejatiannya itu, kritik dan perjuangan bagi perbaikan sistem demokrasi senantiasa sangat diperlukan, sehingga jalan terbaik menuju keadilan sosial menjadi semakin mudah untuk dicapai<sup>7</sup>.

Dorongan untuk memperbaiki sistem demokrasi kini muncul, terutama dalam bentuk usulan amandemen konstitusi ke-5. Bertujuan memperkuat posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan memberikan pemilikan hak suara dalam menetapkan kebijakan politik bersama DPR. Deni Indrayana pakar hukum dari UGM mengemukakan pentingnya amandemen tersebut. Bahwa secara konstitusi, dominasi partai politik telah melahirkan kekuasaan oligarki (Republika 3/2/2007).

Tentu saja hal itu akan menimbulkan masalah dimana politik negara sangat tergantung pada partai. Untuk menempatkan seseorang dalam jabatan strategis di lembaga negara tidak dimungkinkan melalui mekanisme lain selain lewat pintu partai. Tidak hanya dalam memilih presiden dan wakilnya serta anggota legislatif, untuk menyaring calon anggota yudikatif seperti Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melalui mekanisme "*politicking*" di tingkat parlemen yang merupakan wadah partai. Bahkan tangan-tangan politik ikut campur dalam pembentukan kabinet yang hakikatnya merupakan hak prerogatif presiden. Dimana kalau semua kekuasaan negara harus melalui pintu partai, ini berbahaya.

Argumen Deni diatas, setidaknya menyiratkan bahwa tuntutan amandemen ke-5, perlu diikuti dengan amandemen lainnya. Dimana kesetaraan posisi eksekutif dan yudikatif masih perlu ditegakan berhadapan dengan kekuatan politik legislatif. Munculnya dominasi legislatif terhadap kedua lembaga lainnya saat ini perlu dianggap sebagai

---

<sup>7</sup> Di tengah maraknya skeptisisme terhadap peran Indonesia, pada 12 November 2007 Indonesia mendapat Democracy Award dari International Association of Political Consultants (IAPC). Penghargaan ini diberikan terhadap seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilannya menyelenggarakan pemilu langsung yang demokratis dan minim kekerasan pada 2004. Juga penghargaan terhadap ikhtiar seluruh rakyat untuk bangkit dari keterpurukan politik di era orde baru melalui reformasi 1998. Sedikit banyak, penghargaan ini adalah sebuah pengakuan bahwa bangsa dan negara Indonesia masih memiliki potensi; Heru Susetyo, "Wajah Indonesia di Pentas Dunia" *Republika*, 24 Nopember 2007.

proses transisi yang mencerminkan respon politik terhadap kenyataan sebelumnya dimana eksekutif cenderung dominan. Pelajaran yang perlu dipetik adalah bahwa dominasi dari suatu kekuasaan, selalu mengarah pada kecenderungan terjadinya penyelewengan aspirasi publik. Dengan demikian, mengacuhkan dominasi legislatif-oligarkis yang kini sedang berlangsung adalah menunggu prahara baru yang sangat tidak kita harapkan<sup>8</sup>.

Nampaknya, perjuangan dan penegakan demokrasi harus terus diupayakan. Keadilan sosial sebagai cita-cita kolektif bangsa tidak akan tercapai, bila kekuasaan berada dalam dominasi segelintir manusia. Kekuasaan oligarkis dengan kendali para medioker tidak dapat menjadi tumpuan untuk terjadinya kemajuan. Demokrasi harus diperjuangkan agar kebebasan sebagai hak warga negara dapat tersalurkan sehingga kebijakan negara berdasar pada kebenaran. Di sisi lain, demokrasi harus ditegakan agar pencapaian keadilan sosial sebagai kewajiban negara sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan warganya<sup>9</sup>.

### **Kepemimpinan Meritokratis**

Melalui demokrasi, kebijakan yang salah dan merugikan publik dapat dikoreksi secara terbuka, rasional, dan obyektif. Dengan demokrasi, pemimpin yang tidak mampu memenuhi harapan rakyat, tidak akan sanggup mempertahankan kekuasaannya. Ungkapan yang menyatakan bahwa, "musuh yang pintar akan lebih menolong daripada teman yang bodoh, dan lawan yang jujur lebih bermanfaat daripada kawan yang culas" sangat bermakna dalam kehidupan demokrasi yang memberikan kebebasan untuk mengkritisi kekuasaan. Dimana kejujuran dan kearifan yang menjadi bagian dari karakter cendekiawan merupakan elemen penting bagi tegaknya kehidupan politik yang demokratis.

---

<sup>8</sup> Sangat ironis ketika *Global Corruption Barometer 2005* (Gallup International), misalnya, menyampaikan bahwa partai politik sebagai lembaga terkorup dengan nilai 4,2 (dari kisaran 1 sampai 5). Parpol bisa berpeluang korupsi karena bisa "menjual" kewenangan politik mereka untuk mendulang keuntungan, di mana kewenangan politik bisa diubah menjadi dana operasional bagi kelangsungan hidup parpol untuk meraih dukungan suara dalam pemilu. Parlemen menduduki peringkat di bawahnya dengan nilai 4,0, yang salah satunya ditandai dengan berkembangnya isu moral karena terlibat percaloan. Refleksi Perjalanan Bangsa 2005 & Perspektif 2006 *Simposium Nasional Mewujudkan Cita-Cita Bangsa* yang diselenggarakan tanggal 30 November-1 Desember 2005, Habibie Center.

<sup>9</sup> Bagi negeri-negeri Dunia Ketiga untuk membasmi kemiskinan melalui proses industrialisasi berdasarkan pola barat adalah salah sama sekali. Bentuk negara-negara ini membutuhkan akumulasi surplus, tetapi negeri-negeri ini hendaklah mengarahkan proses akumulasi ini dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan situasi mereka - Joan Robinson dikutip oleh Sritua Arief --.

Rentannya kehidupan ekonomi<sup>10</sup> bangsa saat ini merupakan gejala dari lemahnya kerjasama antara pemerintah dan rakyat, sekaligus menunjukkan rendahnya kemandirian<sup>11</sup> diantara keduanya<sup>12</sup>. Oleh karena itu, kaum cendekiawan pada satu sisi perlu mengupayakan kemandirian diantara pemerintah dan rakyat dan pada sisi lain mengembangkan kerjasama diantara keduanya<sup>13</sup>.

Fungsi politik kaum cendekiawan kini dengan demikian diantaranya adalah membina kemandirian rakyat melalui oposisi politik sebagai upaya mengontrol pemerintah dengan berpijak pada konstitusi. Selain membimbing tumbuhnya kerjasama diantara keduanya melalui sikap patuh atas hukum (baca: dan etika berpolitik) untuk menjamin terlaksananya tujuan bernegara<sup>14</sup>.

Upaya oposisi akan menjadi sumber dinamika perubahan politik bagi lahirnya kebijakan negara kearah yang lebih obyektif<sup>15</sup>. Dan sikap

---

<sup>10</sup> Tingkat kemiskinan di negara kita masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2006, sebanyak 39,05 juta atau 17,75% dari 222 juta penduduk Indonesia. Jumlah yang meningkat dibanding setahun sebelumnya yaitu 35,10 juta atau 15,97% dari 220 juta penduduk. Sementara, terakhir Bank Dunia dengan menggunakan indikator kemiskinan moderat (pendapatan kurang dari 2 dolar per hari) tercatat berjumlah 108,78 juta atau 49%. Dibalik angka di atas ada banyak fakta menyedihkan seperti busung lapar, gizi buruk, tingkat kematian ibu melahirkan, tingkat kematian akibat sakit malaria, kurangnya akses air dan sanitasi, besarnya jumlah anak yang tidak bisa menamatkan pendidikan dasar 9 tahun, dan relatif besarnya anak usia 7 - 15 tahun yang belum bisa menikmati pendidikan sekolah. Bambang Ismawan, "Implementasi Program CSR untuk Penanggulangan Kemiskinan". Makalah yang disampaikan pada Konferensi CSR Indonesia, 24 April 2007.

<sup>11</sup> Kemandirian bukan hanya penting, tetapi sekaligus adalah kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Sekurang-kurangnya Soekarno pernah mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri dari kemandirian bangsa yaitu : Berkedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Drs. H. Syakhyan Asmara, M, SP. *Membangun Jiwa Nasionalisme dan Jiwa Kepeloporan Pemuda*, 13 Februari 2008.

<sup>12</sup> *Kompas*, 29 November 2007 : Per 31 Oktober 2007, total utang pemerintah setara Rp 1.382,9 triliun di posisi nilai tukar Rp 9.315 per dollar AS. Itu terdiri atas pinjaman luar negeri 60,94 miliar dollar AS dan surat utang negara senilai 87,52 miliar dollar AS.

<sup>13</sup> Ditilik dari sudut *kenegaraan*, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang belum berhasil. Menjadi negara setidaknya harus memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam ditunjukkan oleh kemampuan negara untuk memelihara hukum dan ketertiban. Sedangkan keluar ditandai kemampuan untuk melindungi kepentingan bangsa dalam pergaulan antarbangsa dalam posisi terhormat. Nyatanya, kedua hal itu tak terpenuhi oleh Negara ini. Yudi Latif, "Islam, Indonesia dan Demokrasi".

<sup>14</sup> Cak Nur melihat perlunya suatu kelompok yang mampu menawarkan kerangka yang memberi peluang kepada warga masyarakat untuk mengikat tali hubungan dengan pemerintah pada satu saat. Dan pada waktu yang lain mungkin mewujudkan atau malah melepaskan ikatan itu namun dengan tanggung jawab, yakni ruang bagi adanya ikatan antara negara dan civil society baik yang sejalan maupun yang bersimpangan, *Jawa Pos* 2000.

<sup>15</sup> Dengan kehadiran oposisi masalah *accountability* atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan pemerintah. Tidak segala sesuatu akan diterima begitu saja, seakan-akan

untuk mematuhi hukum akan menjadi sumber perekat antara rakyat dan pemerintah dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum merupakan tiang bagi terjaminnya rasa keadilan di kalangan warga negara, elemen sosial, partai politik, serta kelembagaan negara. Dan oposisi politik menjadi motor penggerak yang memotivasi penciptaan kebijakan inovatif untuk memenuhi tuntutan obyektif kehidupan rakyat. Oleh karena itu, oposisi dalam politik dan kepatuhan terhadap hukum<sup>16</sup> di dalam kehidupan bernegara menjadi kebutuhan paling dasar dalam melahirkan kebijakan yang adil dalam sistim yang demokratis. Dimana kaum cendekiawan berperan sebagai pencipta perubahan dan teladan dalam kehidupan politik dengan visi sebagai negarawan<sup>17</sup>.

Azas meritokrasi dalam kehidupan politik dengan demikian menjadi tuntutan untuk dapat diterapkan. Prestasi dan reputasi perlu untuk menjadi dasar dalam penentuan kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik perlu untuk berpijak pada pepatah yang sangat dikenal, yaitu *ing ngarso sing tulada, ing madya sing bangun karsa, tut wuri handayani*. Dimana seorang pemimpin terseleksi sebagai orang yang sanggup memberikan teladan, memberikan motivasi dan memperjuangkan aspirasi publik<sup>18</sup> bagi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

---

dengan sendirinya jelas, atau beres dalam pelaksanaannya. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa suatu kebijaksanaan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya, dan dengan cara bagaimana kebijaksanaan itu akan diterapkan. Ignas Kleden, "Oposisi dalam Politik Indonesia", Juli 1998)

<sup>16</sup> Mas Achmad Santosa, Ketua Iluni FH UI, mengidentifikasi ada empat persoalan hukum mendasar, yaitu konsepsi penegakan hukum, hukum tata kelola pemerintahan yang baik, pemulihan citra lembaga penegakan hukum, dan hukum untuk memacu investasi. Kompas, 04 Desember 2007

<sup>17</sup> Cendekiawan yang bervisi kenegarawanan adalah seorang demokrat yang bukan hanya sanggup untuk menerima perbedaan sebagai kenyataan, akan tetapi ia juga mampu menghargai perbedaan sebagai sumber dinamika kreatifitas bahkan pencerahan masyarakat. Dengan demikian seorang cendekiawan harus juga memiliki sikap antusias terhadap keragaman pandangan sebagai sumber yang berharga bagi terjadinya perbaikan kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa "keragaman adalah rahmat dari Tuhan".

<sup>18</sup> Terjadinya banyak gejolak politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), disinyalir lebih didorong oleh perilaku politik uang, bukan atas dukungan terhadap integritas para kontestannya. Fenomena ini setidaknya digambarkan oleh Nanat Fatah Natsir, bahwa biaya untuk mencalonkan diri dalam pilkada kabupaten/kota diperkirakan mencapai kisaran 7,5 - 15 Milyar. Andaikan gaji dari Bupati/walikota sebesar 50 juta. Bisa dibayangkan sekitar 12 x 5 x Rp 50 juta yang besarnya hanya mencapai Rp 3 milyar. Walhasil pemimpin yang terpilih akan nombok untuk membayar biaya kompetisi pemilunya. Tentu saja ini bukanlah uang pribadi tetapi uang dari para pendukungnya, yang bila kemenangannya teraih harus dikembalikan dengan kompensasi yang lain, yaitu kebijakan yang akan lebih

Kepemimpinan yang meritokratis dengan demikian akan menumbuhkan sikap obyektif di kalangan publik yang menjadi sumber dari rasa tanggungjawab dalam penentuan kebijakan bernegara. Dimana pada satu sisi dengan keteladanannya dapat memperkuat rasa kebangsaan yang berakibat dengan semakin tingginya motivasi rakyat dalam mendukung kemajuan. Dan pada sisi lain dengan integritasnya akan menjadi sokongan moril bagi pencapaian kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan dari rasa keadilan.

Politik dan cendekiawan karenanya merupakan sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pemikiran kritis cendekiawan merupakan daya pikat dukungan publik dalam melaksanakan tugas perjuangan politik dari sebuah partai. Partai politik sebagai media perjuangan tidak memiliki makna pencapaian keadilan sosial tanpa pemikiran kritis kreasi para cendekiawan. Sejatinya cendekiawan selalu memiliki daya yang lebih besar dari tatanan politik dan kapital yang cenderung mengerdilkannya. Dengan itu, gagasan dan tindakan politik kaum cendekiawan menjadi garda terdepan dalam penciptaan perubahan. Dimana publik kemudian dengan sadar berpartisipasi dalam perwujudan gagasan kaum cendekiawan.

Keberadaan kaum cendekiawan, mungkin tidak akan memunculkan pandangan ironis, bila para cendekiawan secara berani dan terbuka menampakkan otensitas gagasannya untuk memperjuangkan dan menegakkan demokrasi. Sejarah membuktikan bahwa cendekiawan yang memiliki integritas selalu menjadi figur publik sebagai pembawa perubahan. Dan dari integritas cendekiawanlah, biasanya kesejahteraan ekonomi yang kuat dan stabil dalam suatu negara yang demokratis tercapai. Tidakkah Bangsa ini dibangun melalui dua orang *founding fathers*, Hatta sebagai peletak pondasi keadilan sosial dan Soekarno sebagai pembentuk identitas kebangsaan ? Lalu sanggupkah kaum cendekiawan generasi reformasi kini mencipta demokrasi unik keindonesiaan ? Dimana setiap bangsa harus menata negaranya yang berpijak pada sejarah, sosiologis dan falsafah bangsanya sendiri.

---

menguntungkan para pemilik modal daripada rakyat yang memilihnya. (Ceramah buka puasa bersama yang diselenggarakan ICMI di tahun 2007 lalu).

## Daftar Pustaka

- Arief, Sritua. *Teori dan Kebijakan*. Jakarta: CIDES, 1998.
- Aron, Raymond. *Kebebasan dan Martabat Manusia*, terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Asmara, Syakhyan M, SP. "Membangun Jiwa Nasionalisme dan Jiwa Kepeloporan Pemuda". Jakarta : 13 Februari 2008.
- Bottomore, Tom. *Sosiologi Politik*, terj. Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kleden, Ignas. "Gejala Apatisme Politik Menguat", *Kompas*, 11 Desember 2003
- \_\_\_\_\_ "Oposisi dalam Politik Indonesia", 4 Juli 1998
- Ismawan, Bambang. "Implementasi Program CSR untuk Penanggulangan Kemiskinan". Konferensi CSR Indonesia, April 2007.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Latif, Yudi. "Islam, Indonesia dan Demokrasi", makalah t.t.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (terj); Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006.
- Rush, Michael Philip Althof. *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Russel, Bertrand. *Kekuasaan, Sebuah Analisis Sosial baru*, terj. Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Shapiro, Ian. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan freedom Institute, 2006.
- Sosronegoro, Herqutanto. *Beberapa Ideologi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kenegaraan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1990.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL

Beberapa hal yang harus diperhatikan penulis dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut:

### ❑ **Maksud dan Tujuan**

Jurnal Transnasional diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lingkungan Universitas Budi Luhur maupun dari para peneliti lain.

### ❑ **Ruang Lingkup**

Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Nasional.

### ❑ **Bahasa**

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga Pembinaan Bahasa.

### ❑ **Bentuk Naskah**

Naskah diketik pada kertas jenis A4 putih pada satu permukaan dengan jarak 1,5 spasi. Tulisan mempunyai jarak 3cm dari Kanan dan kiri kertas, atas dan bawah kertas berjarak 2,5cm. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan jenis font Arial ukuran 11, naskah diketik dengan bentuk satu kolom.

### ❑ **Isi Naskah**

Naskah disusun dalam urutan: judul (Bahasa Indonesia); Nama penulis: lembaga/instansi: Abstrak ( 100-150 kata) dalam bahasa Inggris berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; Pendahuluan ( berisi latar belakang; perumusan masalah; Tinjauan Pustaka; Tujuan penelitian); Metode penelitian ( alat, bahan, cara dan metode Analisis); Hasil dan pembahasan; Kesimpulan; Daftar Pustaka, lampiran (jika ada).

### ❑ **Judul Karangan dan Nama Pengarang**

Judul karangan berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik penulisan.

### ❑ **Tabel dan Gambar**

Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,... dst).

### ❑ **Daftar Pustaka**

Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.

### ❑ **Alamat Redaksi**

Naskah dikirim dalam bentuk file(copy CD) dan 1 print out ke: Redaksi Jurnal Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petungkang Utara, Jakarta Selatan 12260, Telp. (021) 5853753 Ext. 252